

# PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM PERUBAHANNYA



PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM PERUBAHANNYA

Ramadhan Prasetya Wibawa, M.Pd., dkk.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)  
Jl. Rajawali, Cemp. Tang 6 No.3, Desa, Kecamatan, Ngablak, Sleman  
Jl. Kalurahan No.9, Yogyakarta 55581  
Telp./Fax : (0271) 433127  
Anggota : GPH (076/2012)  
@deepublish.co.id @penerbitbuku\_deepublish  
#penerbit\_deepublish www.penerbitbuku.deepublish.com

Kategori : Sosial dan Keluarga

ISBN 978 602 412 702 4



9 786024 759384

**Ramadhan Prasetya Wibawa, M.Pd.**  
**Liana Vivin Wihartanti, M.Pd.**  
**Khoirul Huda, M.Pd.**  
**Yoga Ardian Feriandi, M.Pd.**

# **Perempuan Kepala Keluarga dalam Perubahannya**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **Perempuan Kepala Keluarga dalam Perubahannya**

Ramadhan Prasetya Wibawa, M.Pd.

Liana Vivin Wihartanti, M.Pd.

Khoirul Huda, M.Pd.

Yoga Ardian Feriandi, M.Pd.



**PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM PERUBAHANNYA**

**Ramadhan Prasetya Wibawa, dkk.**

Desain cover

**Nama**

Sumber

link

Tata letak :

**Dewi Permatasari**

Proofreader :

**Nama**

Ukuran :

**vi, 70 hlm, Uk: 15.5x23 cm**

ISBN :

**No ISBN**

Cetakan Pertama:

**Oktober 2018**

Hak Cipta 2018, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2018 by Deepublish Publisher**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**

**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)

[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)

E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, serta petunjuk-petunjuknya penulisan Bahan Ajar *Perempuan Kepala Keluarga dalam Perubahannya* ini dapat diselesaikan.

Bahan ajar Perempuan Kepala Keluarga dalam Perubahannya ini merupakan hasil dari penelitian pada perempuan kepala keluarga di Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Bahan ajar ini bisa digunakan sebagai sumber belajar diantara demikian banyak bahan ajar yang lain yang dapat diperoleh atau diakses melalui berbagai sumber informasi yang tersedia.

Penulis berharap bahan ajar ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa bahan ajar ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan dalam pembuatan bahan ajar ini.

Akhirnya, diharapkan buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa, masyarakat di Kecamatan Gesi, Pemerintah Kabupaten Sragen, dan masyarakat umum. Semoga buku ini akan dapat menambah wawasan pengetahuan maupun teori bagi para pembaca

Madiun,  
**Penulis**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Menjalankan Fungsi Keluarga dan Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga di Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Jawa Tengah.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II Perempuan Kepala Keluarga: Pergeseran Peran dan Konstruksi Sosial dalam Feminisme Lokal .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III Paradigma Perempuan sebagai <i>Inclusive Citizenship</i> dan Diskursus Hak Perempuan dalam Perspektif Pancasila .....</b>	<b>54</b>
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	69

# **BAB I**

## **Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Menjalankan Fungsi Keluarga dan Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga di Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Jawa Tengah**

### **A. Latar Belakang**

Pada tahun 2016, Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan terdapat 65 juta keluarga di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 14% (9 juta) dikepalai oleh perempuan. BPS telah mengkualifikasikan bahwa orang yang dapat disebut sebagai kepala keluarga yakni orang yang dalam kenyataannya bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari dalam sebuah rumah tangga atau orang yang dianggap sebagai kepala keluarga.

Nilai sosial budaya masyarakat, umumnya masih menempatkan perempuan dalam posisi sub-ordinat. Sebagaimana secara tegas juga tertulis di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, bahwa dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan di Indonesia, kepala keluarga adalah suami atau laki-laki. Berpijak dari itulah, keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga tidak sepenuhnya diakui baik dalam sistem hukum yang berlaku, maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Akibatnya perempuan kepala keluarga menghadapi diskriminasi hak dalam kehidupan sosial politiknya.

Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya miskin dan merupakan kelompok termiskin dalam strata sosial ekonomi di Indonesia. Hal ini terkait erat dengan kualitas sumber daya perempuan kepala keluarga yang rendah. Data dasar Sekretariat

Nasional PEKKA di 8 provinsi menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga umumnya berusia antara 20-60 tahun, lebih dari 38.8% buta huruf dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar sekalipun. Sebagian perempuan menghidupi antara 1-6 orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp 10.000,00 per hari. Banyak dari mereka bahkan telah mengalami trauma karena tindak kekerasan dalam rumah, termasuk pembatasan hak-haknya dalam kegiatan ekonomi. Terlepas dari semua kondisi kehidupan perempuan yang memprihatinkan, perempuan khususnya yang hidup di negara berkembang sebenarnya memiliki peran tersendiri sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BP3AKB Provinsi Jawa Tengah menginisiasi kegiatan *Capacity Building* sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang kritis terhadap isu-isu perempuan dan pengembangan ekonomi mikro dalam menghadapi persaingan ekonomi dan mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, terutama di wilayah Jawa Tengah.

Inisiasi awal ini melibatkan 30 perempuan kepala keluarga di wilayah Pantura (Kabupaten Pemalang, Batang dan Kota Pekalongan) yang dilaksanakan pada 22-23 September di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan. Melalui kegiatan ini diharapkan akan; (1) Teridentifikasi permasalahan/isu gender yang terkait dengan perempuan kepala keluarga (baik akses permodalan, pemasaran, produksi, budaya patriarkhi, dan lain sebagainya), (2) Meningkatkan kapasitas dan wawasan perempuan kepala keluarga tentang gender dan pembangunan, serta (3) Membangun kesadaran kritis perempuan kepala keluarga dalam menginisiasi dan mendorong kebijakan yang responsif gender.

Kondisi awal dan studi awal yang tampak di Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen menurut data BPS tahun 2016 bahwa Jumlah Kepala Keluarga Laki-laki 6,190 dan Jumlah Kepala Keluarga Perempuan 1,218 dengan jumlah total 7,408 Kepala Keluarga. Studi awal perempuan yang menjadi kepala keluarga di Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen ditinggal suami karena beberapa alasan: (1) PHK, (2) merantau tidak kembali, (3) menikah lagi, (4) sakit berkepanjangan (5) bercerai. Beberapa hal tersebut menjadikan perempuan berperan tunggal dalam menjalankan fungsi keluarga dan harus berupaya menciptakan kemandirian ekonomi keluarga melalui kursus, pelatihan *soft skill* yang diadakan gratis oleh pemerintah daerah, dan pembuatan usaha yang mampu menambah pendapatan keluarga.

BP3AKB sebagai *leading sector* penguatan kapasitas perempuan, dan secara khusus perempuan kepala keluarga, telah berkomitmen untuk menginisiasi dan mengawal program-program penguatan perempuan kepala keluarga dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini secara tegas disampaikan oleh Kepala BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Dra. Sri Kusuma Astuti, M.Si.

## **B. Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Menjalankan Fungsi Keluarga dan Menciptakan Kemandirian ekonomi Keluarga di Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Jawa Tengah**

### **Pengertian Peran**

Berbicara mengenai peran, akan lebih jelas jika dikaitkan dengan posisi. Posisi adalah situasi atau kedudukan seseorang di dalam struktur sosial. Dan bila dikaitkan dengan aspek penilaian tinggi atau rendah, maka sudah menggambarkan status dari posisi tersebut, sedangkan peranan adalah aspek dinamis dari suatu

posisi, jika dikaitkan dengan kategori individu tertentu dalam sistem sosial, maka telah ada menggambarkan peranan yang ada hubungannya dengan peran-peran rumusan yang berlaku khusus untuk kategori yang bersangkutan Aida Vitayala (dalam Ismah Salman, 2005:61)

Dalam hidup bermasyarakat, individu menerima suatu status dan mendudukinya di dalam hubungan dengan status-status lainnya. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status itu atau mewujudkannya, maka berarti ia melakukan sebuah peran.

Menurut Linton Ralph (2004: h. 148-150) Status dan peranan merupakan *ideal patterns* bagi kehidupan sosial. Dan juga merupakan "model" untuk mengorganisir sikap dan tingkah laku individu lainnya di dalam turut serta mengekspresikan *social pattern*.

Lebih lanjut Linton Ralph (2004: h. 150) mengungkapkan selama tidak ada intervensi dari sumber-sumber luar, maka makin sempurna para anggota masyarakat menyesuaikan diri dengan status dan perannya, akan makin baik fungsi masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto (2002: h. 43) "peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peranan". Konsep tentang peran (*role*) bahwa:

1. Bagian tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seorang atau terjadinya karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

### **Perempuan Kepala Keluarga**

Menurut Fitzpatrick (2004) keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan (dalam Vinta, 2016). Terdapat beberapa definisi keluarga dari beberapa sumber, yaitu:

1. Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.
2. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.
3. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3), "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga". Lebih lanjut dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, "Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam

suatu keluarga". Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian kepala keluarga itu sendiri, yaitu orang yang mempunyai tanggungjawab baik secara ekonomi maupun sosial terhadap keluarganya. Perubahan keadaan membuat orang tua yang dulunya lengkap dapat menjadi tidak lengkap yang disebabkan karena adanya perpisahan, yakni kematian, perceraian, atau ayah yang merantau, sehingga ibu harus menjalankan peran sebagai orang tua tunggal dan tanggung jawabnya baik sebagai ibu maupun sebagai ayah.

Dalam fenomena perempuan sebagai kepala keluarga, perempuan diharapkan mampu menjalankan dua peran sekaligus, sebagai ibu yang merawat dan mengurus segala urusan rumah tangga dan sebagai ayah yang mencari nafkah. Istilah yang dipakai oleh Julia Cleves terhadap perempuan kepala keluarga adalah *women headed* (yang dikepalai oleh perempuan) atau *women maintained* (yang dijaga oleh perempuan), yaitu perempuan yang memikul tanggungjawab tunggal menghidupi keluarganya (dikutip dalam Ernawati:2013).

#### **Data Kepala Keluarga Di Kabupaten Sragen Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI	KEPALA KELUARGA PEREMPUAN	JUMLAH
1	KALIJAMBE	14,292	2,804	<b>17,096</b>
2	PLUPUH	14,497	3,226	<b>17,723</b>
3	MASARAN	21,030	3,887	<b>24,917</b>
4	KEDAWUNG	17,836	3,886	<b>21,722</b>
5	SAMBIREJO	11,074	2,756	<b>13,830</b>
6	GONDANG	13,136	3,292	<b>16,428</b>
7	SAMBUNGMACAN	13,174	3,556	<b>16,730</b>
8	NGRAMPAL	11,675	2,881	<b>14,556</b>
9	KARANGMALANG	19,080	4,544	<b>23,624</b>

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI	KEPALA KELUARGA PEREMPUAN	JUMLAH
10	SRAGEN	18,805	5,217	<b>24,022</b>
11	SIDOHARJO	16,312	3,431	<b>19,743</b>
12	TANON	16,780	4,328	<b>21,108</b>
13	GEMOLONG	13,731	3,258	<b>16,989</b>
14	MIRI	10,381	2,185	<b>12,566</b>
15	SUMBERLAWANG	14,051	3,328	<b>17,379</b>
16	MONDOKAN	11,116	2,290	<b>13,406</b>
17	SUKODONO	9,599	2,763	<b>12,362</b>
18	GESI	6,570	1,537	<b>8,107</b>
19	TANGEN	7,981	1,732	<b>9,713</b>
20	JENAR	8,222	1,914	<b>10,136</b>
<b>TOTAL</b>		<b>269,342</b>	<b>62,815</b>	<b>332,157</b>

Sumber Data: DKB Semester 2 Tahun 2017

### Peran Perempuan Kepala Keluarga

Calvin dan Gardner (dalam Ismah Salman, 2005: 63) mengklarifikasi strategi-strategi *coping* yang ada dalam tipe-tipe peran perempuan, yaitu:

1. Tipe I: Mendefinisikan ulang peran struktural (*structural role definition*) mencakup kegiatan-kegiatan mendefinisikan kembali peran-peran dari diri dan orang-orang yang terlibat supaya lebih sesuai dengan situasi yang ada, misalnya dengan memberikan peran-peran yang baru pada masing-masing anggota keluarga, baik istri, suami, anak, atau pihak lain.
2. Tipe II: Mendefinisikan ulang peran personal (*personal role definition*) yaitu mendefinisikan kembali peran-peran personal yang diemban oleh individu perempuan, tanpa harus mengubah lingkungan.

3. Tipe III: Tingkah laku peran reaktif (*reactive role behaviour*) yaitu usaha individu melaksanakan semua peran dan tuntutan yang ada dengan maksud untuk memuaskan semua pihak (*syndrome superwomen*).

Dari semua tipe *coping* di atas, yang paling efektif dan sesuai dengan ajaran islam serta kemampuan perempuan sebagai manusia, maka tipe I lebih tepat untuk dikembangkan, baik untuk individu maupun organisasi perempuan. Dalam kenyataan, kebanyakan pekerja perempuan, dalam rumah tangga bersifat rangkap tiga; pertama, sebagai ibu dengan tugas reproduktif (melahirkan), kedua, melaksanakan fungsi produktif dengan menghasilkan uang untuk kepentingan keluarga, dan ketiga sebagai anggota masyarakat.

Menurut Aida (dalam Ismah Salman.2005: 63) pemilihan peran yang akan terjadi dapat terbentuk melalui:

1. Peran Tradisi, menempatkan perempuan dalam fungsi reproduktif (mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, mengayomi suami). Hidupnya seratus persen untuk keluarga. Pembagian kerja sangat jelas, perempuan di rumah, laki-laki diluar rumah
2. Peran Transisi, memolakan peran tradisi lebih utama dari yang lain. Pembagian tugas menurut aspirasi gender tetap eksis mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap menjadi tanggung jawab perempuan.
3. Dwi Peran, memosisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, peran domestik-publik sama penting. Pendapat suami menjadi pemicu ketegaran atau keresahan.
4. Peran Egalitarian, menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan diluar. Dukungan moral dan bentuk kepedulian laki -laki. Sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan.

5. Peran Kontemporer, adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlahnya belum banyak tetapi benturan demi benturan dari dominasi yang belum terlalu peduli kepada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya.

### **Fungsi Keluarga**

Pendapat dikemukakan oleh Cohen, Bruce. J (2003: 179-180), fungsi keluarga adalah sebagai sebuah lembaga sosial yang memegang peranan penting, yaitu : Pengasuhan dan perlindungan anak yang kecil, remaja, dewasa dan orang jompo. Keluarga memiliki tanggung jawab atas pengasuhan dan perlindungan bagi anggota keluarga. Bagi si kecil memberikan perawatan dan pengasuhan serta mencukupi kebutuhan bagi keluarga yang lanjut usia sebagai perwujudan cinta antar anggota keluarga.

1. Sosialisasi anak
2. Mengatur penempatan dalam masyarakat dan menetapkan status
3. Menyajikan jaminan ekonomi

Fokus yang akan diteliti peran dalam menjalankan fungsi keluarga pada (1) fungsi sosialisasi anak yaitu hubungan komunikasi antara ibu dan anak dan di dalam masyarakat, (2) fungsi afeksi yaitu Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya, (3) fungsi edukatif yaitu bagaimana tanggung jawab seorang ibu terhadap pendidikan anak-anaknya, (4) fungsi religius yaitu bagaimana ibu aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan bagaimana ibu menanamkan teladan yang baik dalam memberikan kaidah-kaidah ajaran agama yang diyakininya, (5) fungsi ekonomi yaitu masalah keuangan dan cara mengatasinya.

### **Kemandirian Ekonomi Keluarga**

Dalam skala nasional, posisi ekonomi perempuan adalah strategis, karena peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional mendapat prioritas yang tinggi (Sjaifudian dkk : 1995). Mengembangkan usaha mikro menjadi sangat relevan dengan isu perempuan mengingat usaha kecil merupakan sumber pendapatan dan peluang usaha bagi kebanyakan perempuan dan masyarakat miskin pada umumnya. Oleh karenanya, mengembangkan usaha mikro secara langsung akan meningkatkan posisi ekonomi perempuan. Terkait dengan posisi ekonomi perempuan, banyak LSM membuat asumsi bahwa peningkatan posisi ekonomi perempuan secara otomatis akan meningkatkan kedudukan sosial ekonomi perempuan yang lebih baik. Dalam hal ini mereka menolak mementingkan hubungan antara tujuan ekonomi dan program pendidikan yang berusaha keras merubah pandangan tradisional patriarkal dan pola perilaku perempuan dan laki-laki. (Berninghausen, 1992).

### **Strategi Menciptakan Kemandirian Ekonomi**

Kemandirian ekonomi perempuan segera tercapai jika terbuka berbagai akses pendukung pengembangan usaha dan memiliki otonomi untuk mengambil keputusan dengan kesadaran akan kesetaraan dan keadilan. Kenyataannya perempuan menghadapi kendala dalam aspek bisnis, kendala lain yang dihadapi adalah pelemahan posisi perempuan pedesaan akibat dari aspek kebijakan dan hubungan sosial kekerabatan. Kendala-kendala tersebut pada satu sisi merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan dan pada sisi lainnya dapat dikatakan merupakan ukuran yang harus dicapai untuk terciptanya kemandirian ekonomi perempuan.

Sebagai upaya sadar untuk memperbaiki suatu kondisi, membangun kemandirian ekonomi perempuan dilakukan secara individu maupun kelompok dengan menggunakan strategi yang ditawarkan sebagai berikut: *Pertama*, membangun penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan dimengerti bahwa perempuan usaha mikro menggabungkan diri dalam kelompok, dimana dalam kelompok terjadi proses belajar-mengajar serta saling membantu di antara anggota. Melalui kelompok juga terjadi pengumpulan daya dan dana untuk mengatasi masalah secara mandiri. Adanya pengumpulan sumber daya dan dana ini berarti memunculkan kekuatan bersama dan kesadaran kritis perempuan. Jadi, tidak hanya sumber daya berupa uang untuk pemupukan modal namun sumber daya lain dapat digali potensinya seperti ide, pikiran dan tenaga. Selain itu, melalui kelompok juga bentuk-bentuk penguatan kemampuan perempuan dapat diimplementasikan.

*Kedua*, membangun penguatan modal. Selain melakukan pemupukan modal dalam kelompok yang biasanya melalui mekanisme simpan pinjam, kelompok dapat mengembangkan modal yang terkumpul dengan membuka akses ke bank atau sumber-sumber permodalan lainnya. Akses ini perlu dibekali dengan perhitungan analisis usaha, sehingga usaha semakin cepat berkembang baik dari sisi kuantitas dan kualitas.

*Ketiga*, membangun jaringan informasi pengembangan teknis usaha. Membangun jaringan informasi yakni informasi pengembangan teknis usaha menjadi sangat penting karena kemampuan teknis yang dimiliki terbatas. Dengan informasi pengembangan teknis usaha, pelaku usaha mikro dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Jaringan informasi tidak hanya terbatas pada teknis usaha, tetapi juga dapat mencakup mengenai isu aktual dan produk kebijakan yang sangat terkait

dengan kehidupan perempuan untuk peningkatan pemahaman mereka terhadap hak-hak perempuan dan warga negara, misalnya Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 dsb. Penggunaan teknologi informasi seperti internet dalam hal pengembangan informasi menjadi keniscayaan untuk dimulai pelaksanaannya.

*Keempat*, membangun jaringan informasi pasar. Dalam membangun jaringan informasi pasar, perempuan hanya mengandalkan pada pemasaran yang konvensional yakni umumnya di sekitar lokasi sendiri. Keterbatasan menembus jaringan pasar yang lebih luas membuat perempuan usaha mikro mengalami hambatan. Oleh karenanya dukungan pihak ketiga seperti pemerintah atau departemen teknis terkait diperlukan untuk pengembangan pasar yang sangat mereka butuhkan. Pengembangan pasar dapat dilakukan dalam bentuk informasi pasar, membentuk unit pemasaran bersama atau membuka jaringan pasar.

*Kelima*, advokasi. Hal lain yang dirasakan mendukung adalah advokasi yang terus menerus terhadap mereka sehingga suara perempuan didengar dan diperhatikan oleh pengambil kebijakan. Dengan demikian, jika strategi tersebut dapat berjalan sesuai harapan maka kemandirian ekonomi perempuan dapat segera terwujud.

## **Tinjauan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Jawa Tengah Di Lanjutkan**

1. Kondisi Geografis
  - a. Letak Daerah

Kecamatan Gesi terdiri dari 7 (tujuh) desa/kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di desa Gesi: luas Kecamatan kurang lebih 3.958,04 ha yang terdiri dari tanah sawah 767,90

ha (19,40%) dan tanah kering 3190,24 ha (80,60%). Wilayah Kecamatan Gesi secara administrasi berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Tangen

Sebelah Timur : Kecamatan Tangen

Sebelah Selatan : Kecamatan Sragen

Sebelah Barat : Kecamatan Sukodono

b. Pembagian Wilayah

Kecamatan Gesi terbagi dari 7 desa yaitu Desa Pilangsari dengan jumlah RT: 953, Desa Tanggan dengan jumlah RT: 1290, Desa Srawung dengan jumlah RT: 649, Desa Gesi dengan jumlah RT: 1020, Desa Blangu dengan jumlah RT: 1241, Desa Slendro dengan jumlah RT: 1009, Desa Poleng dengan jumlah RT: 1023.

2. Kondisi demografi

Jumlah penduduk di Kecamatan Gesi secara keseluruhan 19.856 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah penduduk laki-laki : 9482 jiwa

Jumlah penduduk perempuan : 10374 jiwa

Jumlah kepala keluarga ( KK ) : 8107 KK

Komposisi Penduduk

a. Komposisi Penduduk menurut umur

Penduduk usia 0-24 tahun sebanyak 5057 jiwa, Penduduk usia 15-64 tahun sebanyak 13.171 jiwa, Penduduk usia 13-18 tahun sebanyak 1387 jiwa (13,97%), Penduduk usia 65 tahun keatas sebanyak 1627 jiwa .

b. Komposisi Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian merupakan sumber pendapatan bagi kehidupan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia memiliki pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki. Dengan memiliki pekerjaan manusia akan memperoleh pendapatan yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Gesi sangat beragam. Penduduk kecamatan Gesi mempunyai mata pencaharian yang sangat beraneka ragam. Secara lengkap mata pencaharian penduduk adalah sebagai pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, sebanyak 5918 orang, pertambangan 110 orang, industri pengolahan sebanyak 624 orang, perdagangan dan akomodasi 76 orang.

c. Komposisi Penduduk menurut tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang penting dan utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai masyarakat yang telah maju dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan menjadi hal yang utama di Kecamatan Gesi. Tamat Perguruan Tinggi/ sederajat 159 orang, SLTA 1712 orang, tamat SLTP/ sederajat 2428 orang, tamat SD/ sederajat 6693 orang, tidak tamat sekolah dasar 3820 orang (2,75%), belum sekolah 2432 orang.

3. Sarana dan Prasarana

Komunikasi dan transportasi sangat penting bagi kemajuan dan lancarnya kegiatan penduduk di suatu daerah. Dengan adanya komunikasi yang baik akan mempermudah pekerjaan manusia dan mengetahui segala informasi yang ada. Sarana komunikasi yang ada di kelurahan ini telah cukup baik antara lain : telepon, televisi, radio, surat kabar, antena parabola, dan internet. Sarana komunikasi yang ada didukung pula dengan tersedianya sarana transportasi yang cukup memadai dan memiliki posisi yang menguntungkan bagi perekonomian, hal ini dikarenakan Kecamatan Gesi terletak tidak jauh dari pusat kota,

sehingga sebagian besar jalannya, merupakan jalur kendaraan darat yang menuju arah Sragen Kota. Untuk sarana transportasi pribadi, masyarakat telah banyak memiliki sepeda motor.

#### 4. Kondisi Sosial Masyarakat & Ekonomi

Masyarakat di Kecamatan Gesi termasuk masyarakat yang heterogen dengan latar belakang pendidikan, agama, mata pencaharian yang berbeda-beda, namun dalam pola kehidupan sehari-hari masyarakat begitu menjaga keselarasan hidup bersama dengan saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Sebagian besar masyarakat masih sangat melestarikan budaya jawa yang masih melekat kuat, seperti gotong royong, kekeluargaan, dan acara-acara tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat baik religius maupun tradisional. Diantaranya masih dipertahankan upacara adat yang ada dalam siklus kehidupan manusia mulai dari kelahiran sampai dengan kematian. Upacara-upacara yang dimaksud antara lain *mitoni, sunatan, midodareni, telung dinanan, pitung*

*dinanan, patang puluh dinanan, nyatus, mendhak pisan, mendhak pindho, nyewu,* dan lain-lain. Pola kehidupan yang bersifat kekeluargaan masih sangat terasa, hal ini dapat terjaga karena masyarakat senantiasa melaksanakan kerja bakti setiap bulannya, tirakatan 17 Agustus, menjenguk tetangga yang sedang sakit dan halal-bihalal bersama. Keseluruhan warga dari segala golongan umur dengan bergotong royong akan mempersiapkan acara-acara yang telah menjadi tradisi tiap tahunnya. Selain itu apabila ada tetangga yang memiliki hajatan pernikahan, penduduk di sekitar akan membantu dengan sukarela. Seperti misalnya bapak-bapak bertugas mengatur perlengkapan dan peralatan pernikahan, ibu-ibu bertugas mengatur konsumsi dan pemuda-pemudi akan membantu dalam hal *sinoman*. Semangat kerukunan dan

kekeluargaan merupakan fondasi yang terus dijaga dalam kehidupan bersama demi terciptanya keharmonisan dan keselarasan. Hal ini kemudian diaplikasikan dalam bentuk organisasi masyarakat yang terus berjalan, seperti arisan bapak-bapak, PKK, Karang Taruna, pengajian dan lain-lain.

#### 5. Perempuan Kepala Keluarga Perempuan

Suatu keluarga membutuhkan adanya seorang kepala keluarga. Dalam masyarakat Indonesia yang menjadi kepala keluarga adalah suami, namun apabila suami meninggal, bercerai atau berpisah, seorang istri secara otomatis menjadi kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin di Kecamatan Gesi dengan laki-laki sebagai kepala keluarga berjumlah 6570 jiwa sedang kepala keluarga perempuan berjumlah 1537 jiwa.

### **HASIL**

#### **1. Peran Perempuan Kepala Keluarga Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga**

##### **a. Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Fungsi Ekonomi**

Bagi ibu yang berpisah dengan suaminya karena bercerai hal itu dianggap sesuatu hal yang tidak begitu berat dalam melakukan penerimaan diri, sedangkan ibu yang ditinggalkan suaminya karena meninggal akan membutuhkan proses yang panjang akibat kehilangan salah satu figure ayah/suami yang dahulunya menjadi tulang punggung keluarga, baik sebagai pencari nafkah maupun bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Seluruh beban keluarga dilimpahkan kepada salah satu orang tua yaitu ibu, kesulitan dan kesedihan dilalui namun ibu tetap

berusaha terus bangkit demi menjalani kewajibannya sebagai orangtua.

Perubahan perekonomian yang dirasakan Ibu Sn, ekonomi yang tidak begitu buruk, tetapi sampai saat ini Ibu Sn masih bekerja sebagai buruh sehingga kebutuhan hidup dapat dipenuhi dengan baik tanpa bergantung kepada anak-anak dan saudara-saudaranya .

Dari uraian hasil peneltian, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan keluarga berkaitan erat dengan masalah ekonomi yang berkaitan dengan masalah finansial keluarga mengenai pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehingga ibu sebagai kepala keluarga menjadi tulang punggung keluarga dan menjadi tumpuan nafkah keluarga. Apabila dahulu hanya suami/ayah yang bekerja sekarang ibu harus bekerja atau mengusahakan segala cara demi terpenuhinya kebutuhan keluarga, apabila sebelum menjadi orangtua tunggal ibu dan ayah sama-sama bekerja maka ekonomi tidak akan terasa begitu sulit dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam hal ini baik ibu yang sebelumnya telah bekerja maupun tidak bekerja dalam kesehariannya akan lebih mandiri, mengusahakan dengan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, lebih cermat dalam mengatur uang sehingga keadaan ekonomi keluarga semakin baik.

**b. Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Fungsi Edukasi**

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena dalam keluarga anak-anak pertama-tama mendapat pendidikan dan bimbingan, utama karena sebagian besar kehidupan anak adalah dikeluarga. Dengan demikian dari keluarga pembentukan kepribadian anak menjadi manusia yang siap melakukan tugas dan

tanggung jawabnya, menguasai diri, menjalankan peran sosialnya serta mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Ibu sebagai kepala keluarga memiliki peran yang penting dalam keluarga, perubahan peran yang paling dominan dimana ibu memiliki peran baru yakni sebagai wanita yang bekerja dan wanita sebagai ibu rumah tangga. Ibu memiliki tanggung jawab paling besar terhadap pendidikan anak-anak. Dibawah akan dijelaskan mengenai penanaman pendidikan kepada anak, Ibu UA yang bekerja sebagai guru mengatakan,

*“saya sendiri memberi contoh pada anak saya, saya sendiri sekolah, kalau saya menyuruh saya juga memberi contoh pada dia, ini lo ibu sudah tua mau belajar kenapa mau kamu yang masih muda nggak belajar, saya tidak mengharuskan anak saya jadi ini itu, yang penting kamu sekolah dulu, masalah rejeki itu Tuhan yang ngatur”.*(W/UA/24/08/2018).

Ibu UA menceritakan bahwa ia selalu menanamkan kepada anaknya untuk sekolah hingga jenjang yang tinggi, karena saat ini Ibu UA juga melanjutkan kuliah lagi, untuk masalah pekerjaan Ibu UA berserah kepada Tuhan. Ibu UA menceritakan bahwa dalam mendidik anak-anak selalu terbuka agar ibu dan anak-anak dapat saling mengerti keadaan keluarga sehingga anak-anak dapat lebih menghargai ibu yang kini menjadi kepala keluarga dengan segala keterbatasannya, pengungkapannya secara langsung,

*“saya selalu terbuka dengan anak, penghasilan saya 1 bulan sekian, untuk ini sekian-sekian, terus yang lain gimana, kalau saya minta saya harus bagaimana, ini anak-anak saya tahu. Jadi saya punya utang berapa punya rejeki apa, tujuan saya, saya selalu terbuka dengan anak, toh nanti kalau dia mau minta sesuatu dia*

*juga pikir-pikir walaupun kadang anak itu kecewa sebenarnya dia mau minta ini tapi kok keadaannya seperti ni, dia mau berontak la kenyataannya nggak ada". (W/UA/24/08/2018).*

Anak-anak dapat berkembang dengan baik walau tanpa ayah namun tidak dipungkiri bahwa peran ayah sangat dibutuhkan anak, Ibu UA menceritakan anak kedua pernah mengalami minder karena ketiadaan ayah, penuturannya secara langsung,

*"kalau yang kecil itu pernah karena seorang cowok mengidolakan seorang bapak, kalau cewek mengidolakan seorang ibu. Anak saya yang cewek karena ibu menjadi figure dia, menurut anak saya, saya itu orangnya tegar, saya itu orangnya gimana-gimana gitu menurut anak saya, katanya pahlawan anak saya ibu, itu saya nggak ngecap (menambah- nambahi), ini anak saya yang memberi julukan seperti itu kalau yang cowok, karena dulu dekat sekali dengan ayah otomatis langsung putus maka dia kecewa berat sampai dia sudah tidak mau hubungan dengan ayah". (W/UA/24/08/2018).*

Dari pernyataan dapat diketahui bahwa perpisahan akibat perceraian membuat anak-anak merasa kehilangan sosok ayah yang menjadi panutannya, hal ini akan terlihat jelas pada anak-anak laki karena *figure* seorang ayah adalah *figure* yang dekat dan diidolakannya.

Menurut Ibu Ui anak-anaknya dididik terutama untuk memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi,

*"aku ki didik anakku yo kedisiplinan, tidak rendah diri dan selalu berdoa kepada Tuhan karena apapun permintaan pasti ada jawaban dari Tuhan. Uwong ki nek minder ki salah gampang diece uwong". (orang itu kalau minder salah mudah diremehkan orang). (W/Ui/15/08/2018).*

Ibu Mm menjelaskan bahwa ia selalu menanamkan kepada anak- anak untuk selalu terbuka apabila anak-anak memiliki suatu permasalahan, lebih lanjut memberikan pernyataannya,

*“Prinsipnya pokoknya diberi kebebasan tetapi bebas yang terbatas bukan bebas terus los (lepas) semua yo terserah ya nggak tapi masih dalam batas kewajaran semua misal dalam pergaulan atau hal yang lain kamu sudah besar kamu sudah bisa milah-milah mana yang baik mana yang nggak, ya bebas namun tetap dalam batas kewajaran ya dilepas tapi juga masih tetap dalam pengawasan”.* (W/Mm/24/08/2018).

Ibu Mm menambahkan cerita bahwa anak yang terakhir yang dahulunya manja, kini setelah ayah meninggal berubah menjadi anak yang baik dan dapat menerima ketiadaan ayah,

*“sekarang apa-apa nurut nggak pernah memberontak, dulu kalo minta apa-apa gulung, nangis tapi sekarang terlihat perubahannya tanpa dikasih tahu otomatis sudah ngerti”.* (W/Mm/24/08/2018).

Ibu Mm berusaha mengarahkan anak agar dapat berkembang dan bergaul dengan bebas namun terbatas tanpa kekangan dari orangtua namun Ibu Mm memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada anak, anak-anak dianggap telah dewasa dan diberi kepercayaan untuk memilih jalan yang baik. Pernyataan yang hampir sama disampaikan Ibu Co,

*“terhadap anak ya memberi contoh yang baik, sosialisasi dengan tetangga, dengan saudara, kita tidak hanya teori, kita juga praktek, otomatis kan anak-anak mengikuti, kalau sudah dewasa terlalu banyak dicreweti kan malah tidak akan nurut, kalau dengan tingkah laku dan perbuatan mereka kan sudah tahu sendiri”.* (W/Co/24/08/2018).

Pernyataan Ibu Co bahwa walaupun ketiadaan ayah namun Ibu Co selalu mengarahkan anak demi kebaikan dengan bersikap terbuka dan menanamkan sikap demokrasi dalam keluarga dengan memberi contoh melalui tingkah laku yang dilakukan ibu, selain itu juga menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Ibu Co memberikan pernyataan bahwa karena anak pertamanya kini telah bekerja dan penghasilan sendiri, maka ia mengharapkan membantu dalam hal ekonomi,

*“anak saya sekarang saya kasih kuasa, saya sok menyarankan berhubung yang besar (anak pertama) sudah lulus, sudah bekerja, sedikitpun sudah punya penghasilan setidak-tidaknya menggantikan posisi ayah misalnya saja ya adik minta uang ya dikasih”.* (W/Co/24/08/2018).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ibu selalu mengarahkan yang terbaik, walaupun ayah telah meninggal komunikasi keluarga tetap terjaga, ketika anak-anak telah dewasa ibu mengarahkan anak-anak untuk ikut berperan dalam menggantikan tugas ayah dalam keluarga. Dengan begitu mereka belajar bersikap, bertindak agar dapat menjadi panutan dalam keluarga serta mengatur uang supaya dapat menjadi pemimpin keluarga yang baik untuk ke depannya nanti.

Berbeda dengan Ibu Di mengungkapkan setelah sepinggal ayah, peran dalam mendidik anak tetap ia jalani walaupun kini anak-anak telah bekerja sehingga waktu untuk bertemu tidak rutin, namun ibu tetap menjaga komunikasi dengan anak-anak dan selalu mengingatkan anaknya,

*“pertemuane rak mung sekedap kula paringi gambaran biasane pripun apike ngoten, biasane nek ajeng bobok do ten kasur, crito-*

*crito ngoten, iki wektune ngomong dadi nek pas santai-santai, biasane perkara gawean, ati-ati pokoke nek mangkat kudhu donga".(pertemuan hanya sebentar, saya hanya memberi gambaran bagaimana baiknya seperti itu, biasanya kalau mau tidur anak-anak di kasur dan suka ngobrol, ini waktunya saya ngomong jadi sewaktu suasana santai biasanya hal pekerjaan, hati-hati dalam pekerjaan dan sebelum berangkat bekerja harus selalu berdoa). (W/Di/24/08/2018).*

Pengungkapan Ibu Sm sebagai pensiunan mengungkapkan bahwa segala urusan yang menyangkut keperluan keluarga merupakan tanggung jawab penuh sehingga ibu senantiasa mengingatkan dengan tidak mengekang anak-anak, berikut penuturannya,

*"ya kita misalnya kewajiban semua untuk rumah tangga berarti kan yang melaksanakan saya, nah untuk mengarahkan anak, saya memang sering sama anak-anak saya beri pengertian, misalnya orang itu kalau bertindak seperti harus begini, tapi nggak semata-mata jadi kita baru ngomong kita selani, kita isi sedikit-sedikit gitu, memang semua harus menjadi tanggung jawab ibu". (W/Sm/24/08/2018).*

Dalam pendidikan anak Ibu Sm selalu menekankan kepada anak, ibu lebih mementingkan pendidikan dalam hal akademik guna bekal anak-anak dihari depan nanti,

*"yang penting itu sekolah, ora neko-neko nek sekolah sing nganggo kowe dhewe, (tidak macam-macam, kalau sekolah yang menggunakan kamu sendiri), jadi ya mereka sudah dewasa kalau terlalu dikekang, ya kadang kita ingatkan".(W/Sm/24/08/2018).*

Ibu Mk seorang penjual mengungkapkan dalam menjalankan peran mendidik anak, walau ibu sendiri terbatas dalam hal pendidikan namun ia berusaha menjadi figure orangtua yang baik sebagai ayah maupun ibu dan menjadi

panutan bagi anak-anak supaya anak-anak berada di jalan yang benar dan dapat menjadi orang yang baik,

*"kula berusaha dadi bapak kaliyan Ibu ngih paling golek tambahan arto sakniki sing kethok kudu obah terus, sanajan bapak mboten enten kudu tetep usaha-usaha ngoten, nek kangge anak nggih ngarahke mawon supados anak-anak tetep mlampah lurus-lurus, mboten mlencong- mlencong supados dados wong ingkang sae".*(saya berusaha menjadi bapak dan ibu, mencari nafkah tambahan sekarang harus tetap jalan walaupun bapak sudah meninggal saya harus tetap menjalankan usaha, kalau untuk anak saya mengarahkan anak-anak ke jalan yang benar supaya tidak salah dan menjadi orang yang baik). (W/Mk/24/08/2018).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sy tetap berusaha sebaik mungkin dalam hal mendidik anak,

*"kula arahke sebisanya, kula saged anak kula saged Allhamdullilah nggih anak kula nggih mboke ngandhani ngoten wis rumangso mboke ijen, anak kula nggih nurut ngoten".*(saya arahkan sebisa saya, saya bisa anak saya juga bisa, Alhamdullilah ya anak saya kalau ibunya menasehati sudah memahami kalau ibunya sudah sendiri, anak saya juga mau menurut). (W/Sy/24/08/2018).

Ibu Sy mengungkapkan bahwa setelah ayah meninggal anak-anak memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap ibu, ibu memberikan kasih sayang sepenuhnya dan membimbing anak sebaik-baiknya agar anak-anak tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orangtua.

Pendapat yang senada diungkapkan pula oleh Ibu Sn,

*"anak-anak yo tak gematine to nduk, nek eneng yo dipangan nek ora ono yo ndho golek. Pas ora ono yo dho nyambut ngawe sak-sake to nduk yo ono sing laden tukang, yo ono sing buruh opo-opo*

*nyatane yo dho ora isin*".(anak-anak ya saya beri perhatian lebih gitu nduk kalau ada ya dimakan kalau tidak ada ya mencari. Kalau tidak ada ya pada mencari keja apa saja nduk ya ada yang membantu tukang, bruruh apa saja nyatanya juga tidak pada malu).(W/Sn/24/08/2018).

Ibu Sn senantiasa memberikan perhatian terhadap anak-anaknya, anak-anakpun telah memahami keadaan ibu sehingga tidak memiliki banyak tuntutan kepada ibu, anak-anak berusaha untuk mandiri dan mau bekerja keras untuk memperingan ibu. Ibu Sn menjelaskan bahwa anak-anak senantiasa menjaga kerukunan dalam keluarga sehingga apabila ada permasalahan segera diselesaikan, berikut penuturannya,

*"anak-anakku rukun ora tau eneng sing kerengan nek eneng masalah opo-opo yo lek ndho dirampunggi pol-pole masalah sithik ora mulih mengko digoleki utowo mangani pedhet kesoren podho karo lek dho dirampunggi ngono*".(anak-anak saya rukun tidak pernah ada perselisihan kalau ada masalah apa-apa ya segera diselesaikan, paling hanya masalah sedikit terus nggak pulang tapi ya nanti dicari atau memberi makan sapi terlau sore, sama saja segera diselesaikan).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu Ibu sebagai kepala keluarga dalam hal mendidik anak-anak akan berusaha sebaik mungkin memberikan perhatian dan memberikan nasehat agar berjalan di jalan yang benar serta tidak merasa kekurangan kasih sayang karena hanya adanya ibu sebagai orangtua tunggal. Anak-anakpun dengan bimbingan dan kasih sayang serta sikap terbuka dalam keluarga menjadi lebih mengerti akan keadaan ibu sehingga anak-anak dapat menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri tanpa bergantung kepada ayah.

### c. Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Fungsi Sosial

Ibu sebagai kepala keluarga secara otomatis akan terus berhubungan dengan masyarakat dalam kesibukannya sebagai pencari nafkah keluarga dan memiliki tanggung jawab penuh urusan baik dalam keluarga maupun urusan luar keluarga. Dengan menyesuaikan diri keadaan yang baru ibu tetap melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat sehingga mampu mengadakan penyesuaian diri secara efektif yakni senantiasa menjaga keselarasan dalam hubungan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Ibu UA mengungkapkan karena keterbatasannya dalam hal ekonomi sehingga ia menyesuaikan dengan keadaan, apabila kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan uang tidak mengikuti, apabila kegiatan yang berhubungan dengan sosial ibu selalu mengikuti guna menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat berikut penturannya,

*“kalau arisan itu saya tidak ikut, karena kalau arisan itu menyangkut uang, takut saya nanti kalau saya sudah mendapat dulu terus tinggal setor-setor ya kalau punya uang, kalau tidak. Kalau arisan saya tidak ikut tapi kalau iuran di masyarakat saya ikut kemudian kalau ada kumpulan apa, ada undangan apa saya selalu berusaha, tapi kalau menyangkut uang disini, di gang sini ada tabungan setiap senin itu saya juga nggak ikut karena saya kondisikan dengan keuangan saya sendiri”.*(W/UA/24/08/2018).

Ibu Ui mengaku sangat aktif dalam mengikuti kegiatan masyarakat,

*“Hubungan kalih masyarakat sae-sae mawon menawi wonten kerja bakti nggih tumut menawi enten rewangon nggih ndherek rewang. Kula tumut PKK, Posyandu ben tanggal pitulas menawi enten tetonggo ingkang dhuwe gawe nopo, sebisane mbantu nek*

*rewangan ngoten kula mbantu masak nek enten nikahan, bayen nopo kesripahan ngoten. Yen arisan bapak-bapak kalih kerja bakti biasane nggih mas-mase niku".(hubungan dengan masyarakat itu baik-baik saja kalau ada kerja bakti dan hajatan selalu ikut. Saya mengikuti PKK, Posyandu setiap tanggal 17 kalau ada tetangga yang mempunyai hajatan, sebisa mungkin membantu kalau ada hajatan biasanya saya membantu memasak kalau ada nikahan, mempunyai anak atau ada yang meninggal. Kalau arisan bapak-bapak dan kerja bakti biasanya kakak-kakaknya yang mengikuti kerja bakti). (W/Mk/24/08/2018).*

Dikatakan oleh Ibu Mk sebagai anggota masyarakat aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Apabila ada pembantu yang membutuhkan bantuannya ibu senantiasa membantu, apabila ada kerja bakti ibu juga mengikuti sedangkan untuk arisan bapak-bapak dapat digantikan oleh anak laki-lakinya.

Pernyataan diatas didukung oleh ibu Di,

*"mriki niku sok kerja bakti minggu ngoten sok ibu-ibu, nek bapak- bapak kula ngedhalke panganan, jane moten keharusan ning kula sok-sok ngedhalke panganan, nek arisan bapak-bapak kula sami titip".(disini itu kalau kerja bakti kadang ibu-ibu, kalau bapak-bapak saya memberikan makanan, sebenarnya bukan suatu keharusan tetapi saya kadang-kadang memberikan makanan, kalau arisan bapak-bapak saya selalu titip). (W/Di/24/08/2018).*

Ibu Di menjelaskan bahwa di daerah tempat tinggal kadang melaksanakan kerja bakti untuk ibu-ibu sehingga ibu dapat ambil bagian dalam kegiatan masyarakat, apabila ada kerja bakti bapak-bapak ibu mengaku membantu menyediakan makanan, untuk arisan bapak-bapak karena

anak-anak Ibu Di semua perempuan maka tidak diwakilkan anak- anak sehingga biasanya ibu akan menitipkan kepada tetangganya. Pernyataan sependapat dengan pendapat Ibu Mm,

*“kalau untuk pertemuan bapak-bapak memang cuma bagi yang sudah tidak mempunyai bapak ya tidak dilibatkan terus saya pribadi misalnya ada kerja bakti di RT saya merasa kan tidak dapat ikut paling nggak ikutan menyediakan konsumsi saja, membantu menyiapkan minuman atau snacknya, mau kerja bakti langsung kan nggak bisa mau ikutan kan nggak mungkin jadi ya bantu saja”.* (W/Mm/24/08/2018).

Ibu Mm juga mengungkapkan apabila ada kerja bakti yang menyangkut dengan kegiatan bapak-bapak ibu akan membantu dalam hal penyediaan konsumsi sedang untuk kegiatan lain di daerah tempat tinggal Ibu Mm seorang janda tidak dilibatkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan bapak-bapak.

Ibu Co mengatakan ia masih aktif dalam kegiatan masyarakat namun karena sekarang harus mengurus warung guna bekerja mencari nafkah keluarga, untuk itu mengurangi kegiatannya,

*“untuk kegiatan yang masih saya ikuti adalah PKK itu setidaknya pengurus, saya dulu menjadi pengurus RW berhubung saya tu di warung kan terlalu padat sekarang saya kurang saya mengikuti di RT saja bukan berarti tidak boleh untuk ditempati ya mbak tetapi terlalu banyak kesana kesini kan warung nek sering ditinggal kan berat”.* (W/Co/24/08/2018).

Untuk kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pertemuan bapak-bapak, Ibu Co selalu mengarahkan anak laki-lakinya untuk aktif dalam kegiatan masyarakat selain menjaga hubungan yang baik dengan anggota masyarakat juga sebagai sarana pembelajaran bagi putranya kelak.

*“karena pertemuan bapak-bapak itu kan cuma satu bulan satu kali..malam, anjangsana gantian itu saya targetkan untuk anak ikut nanti ndak dikira ndak bisa bersosialisasi dengan masyarakat kan malah kikuk nanti kalau sudah tua, maka dari awal saya ajari berangkat iuran, kerja bakti itu yo tak suruh, yang kecil itu sudah ikut kerja bakti sama bapak- bapak udah berani kok”.* (W/Co/24/08/2018).

Ibu Sm menjelaskan bahwa hubungan dengan dengan anggota masyarakat selalu rukun, ibu aktif dalam kegiatan masyarakat yang lebih mendatangkan manfaat namun kadang-kadang juga pergi ke rumah tetangga, Ibu Sm menambahkan,

*“kalau kerja bakti sudah saya wakili anak-anak kalau untuk arisan bapak-bapak tu karena bapak aktif ikut arisan, bapaknya meninggal, memang saya minta untuk ditempati”.* (W/Sm/24/08/2018).

Ibu menjelaskan untuk kerja bakti, karena anak-anaknya laki-laki semua maka dapat diwakillikan oleh anak-anaknya, untuk arisan karena bapak/suami telah meninggal Ibu Sm tetap meminta untuk diberikan jadwal untuk ditempati.

Pendapat yang senada didukung oleh penuturan Ibu Sn,  
*“sing penting ki injoh rukun wong awake dhewe ora rampung dhewe, ono opo-opo ki karo tonggo teparo”.*(yang penting itu dapat rukun dengan tetangga orang kita tidak selesai sendiri ada apa-apa pasti dengan tetangga). (W/Sn/15/08/2018).

Ibu Sn menjelaskan bahwa manusia hidup harus selalu menjaga kerukunan, karena pada suatu saat membutuhkan pertolongan pasti tetangga, orang yang pertama akan membantu.

Pernyataan diatas didukung oleh penuturan Ibu Sn,

*“urip ning masyarakat iku kudu isoh bermasyarakat, agama niku dingo njangkepi hidup, agama islam niku kudhu ditanamke ingkang saetu ngoten mbak, nek wayahe sholat niku kula elingke mbak”.* (hidup dalam masyarakat itu harus bisa bermasyarakat, agama itu digunakan untuk melengkapi hidup, agama islam itu harus dijalankan dengan benar-benar, kalau waktu sholat itu selalu saya ingatkan mbak). (W/Sy/24/08/2018).

Dikatakan Ibu Sy hal yang hampir sama, yaitu sebagai anggota masyarakat harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan anggota masyarakat, selain itu dalam menjalankan kegiatan beragama harus selalu ditanamkan kepada anak-anak sehingga dapat dipakai anak menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari semua uraian hasil temuan tentang ibu sebagai kepala keluarga dalam kehidupan bermasyarakat diambil kesimpulan, yaitu ibu senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan tetangga, menjalin hubungan rukun, dan saling tolong menolong sesama anggota masyarakat. Disamping aktif dalam kegiatan masyarakat dengan segala keterbatasan waktu, tenaga dan uang ibu tetap mengusahakan semaksimal mungkin menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat secara tidak langsung berarti ibu ikut ambil bagian kemajuan hidup masyarakat.

## **2. Upaya-Upaya Perempuan Kepala Keluarga dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga**

- a. Membangun penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan dimengerti bahwa perempuan usaha mikro menggabungkan diri dalam kelompok, dimana dalam kelompok terjadi proses belajar-mengajar serta saling

membantu di antara anggota. Melalui kelompok juga terjadi pengumpulan daya dan dana untuk mengatasi masalah secara mandiri. Menciptakan home industri kerajinan dan makanan dengan kelompok usaha masyarakat yang sudah berkembang. Adanya pengumpulan sumber daya dan dana ini berarti memunculkan kekuatan bersama dan kesadaran kritis perempuan. Jadi, tidak hanya sumber daya berupa uang untuk pemupukan modal namun sumber daya lain dapat digali potensinya seperti ide, pikiran dan tenaga. Selain itu, melalui kelompok juga bentuk-bentuk penguatan kemampuan perempuan dapat diimplementasikan.

- b. Membangun penguatan modal. Selain melakukan pemupukan modal dalam kelompok yang biasanya melalui mekanisme simpan pinjam, kelompok dapat mengembangkan modal yang terkumpul dengan membuka akses ke bank atau sumber-sumber permodalan lainnya. Akses ini perlu dibekali dengan perhitungan analisis usaha, sehingga usaha semakin cepat berkembang baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Membangun modal dengan koperasi usaha di Desa dan Di wilayah Kecamatan Gesi.
- c. Membangun jaringan informasi pengembangan teknis usaha. Membangun jaringan informasi yakni informasi pengembangan teknis usaha menjadi sangat penting karena kemampuan teknis yang dimiliki terbatas. Dengan informasi pengembangan teknis usaha, pelaku usaha mikro dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Jaringan informasi tidak hanya terbatas pada teknis usaha, tetapi juga dapat mencakup mengenai isu aktual dan produk kebijakan yang sangat terkait dengan kehidupan perempuan untuk peningkatan pemahaman mereka terhadap hak-hak perempuan dan warga negara, misalnya Undang Undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 dsb. Penggunaan teknologi informasi seperti internet dalam hal pengembangan informasi menjadi keniscayaan untuk dimulai pelaksanaannya.

- d. Membangun jaringan informasi pasar. Dalam membangun jaringan informasi pasar, perempuan hanya mengandalkan pada pemasaran yang konvensional yakni umumnya di sekitar lokasi sendiri. Keterbatasan menembus jaringan pasar yang lebih luas membuat perempuan usaha mikro mengalami hambatan. Oleh karenanya dukungan pihak ketiga seperti pemerintah atau departemen teknis terkait diperlukan untuk pengembangan pasar yang sangat mereka butuhkan. Pengembangan pasar dapat dilakukan penguatan jaringan informasi pengembangan teknologi dan dengan pemasaran ke daerah-daerah dan mengikuti expo.

## **PENUTUP**

Suatu kajian fenomena sosial yang menarik meningkatnya jumlah kepala keluarga perempuan. Selama ini kepala keluarga yang kita kenal adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan nomor I tahun 1974, didalam pasal pasal 31 dan 34. Pengertian kepala keluarga saat ini mengalami pergeseran di tengah masyarakat terutama di Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Berdasarkan indikator sosial gender Biro Pusat Statistik 2016 menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia di kepalai oleh perempuan mencapai 13,4 %. Tingkat perceraian mencapai 12 % yang merupakan salah satu penyebab kondisi tersebut.

Terjadinya perubahan fungsi dan peran kepala keluarga merupakan tanggung jawab perempuan sebagai orangtua tunggal setelah ketiadaan suami akibat perceraian/ kematian. Membutuhkan waktu dan proses dalam penerimaan akan ketiadaan suami namun dengan adanya dorongan yang berasal dari anak-anak dan orang-orang sekitar perempuan mampu bangkit dan menjalani hidupnya tanpa adanya suami. Dalam fungsi edukasi terhadap anak dan fungsi sosial dalam masyarakat, ibu tetap dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin. Ibu senantiasa menanamkan nilai moral, sosial dan agama sehingga anak-anak dapat berkembang dengan baik walaupun tanpa figur seorang ayah, serta tetap menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Strategi perempuan kepala keluarga di Kecamatan Gesi dalam menciptakan kemandirian ekonomi keluarga yang ditempuh melalui: menciptakan home industri kerajinan dan makanan dengan kelompok usaha masyarakat yang sudah berkembang, Membangun modal dengan koperasi usaha di Desa, penguatan jaringan informasi pengembangan teknologi dan dengan pemasaran ke daerah-daerah dan mengikuti expo.

## Daftar Pustaka

- Aida Vitayala Hubeis. 2010. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press
- Andi Anirah. 2012. *Peran Strategis Perempuan Dalam Masyarakat*. dalam <http://Musawa.Iainpalu.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2024/05/Andi-ANIRAH-JURNAL-MUSAWA-2012.Pdf>. Diakses tanggal 15 Mei 2016.
- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Farida Hanum. 2011. *Peran Wanita Dalam Membangun Masyarakat Berkeadilan Gender*. Jurnal Sosiopublika. Volume 1 Nomor 1 Oktober 2011: 75-85.
- Goode, William J. 2007. *"Sosiologi Keluarga"*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- H.B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Miles Dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 2009. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Muhammad Teguh. 1999. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ni Made Diska Widayani Dan Sri Hartati. 2024. *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali*. Jurnal Psikologi UNDIP. Volume 13 Nomor 2 Oktober 2024: 249-162.
- Ollenburger. Jane C dan Moore. Helen A. 1996. *Sosiologi Wanita*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Peter Carey dan Vincent Houben. 2016. *Perempuan-Perempuan Perkasa Di Jawa Abad XVIII-XIX*. Jakarta: Gramedia.

- Prihatinah, Tri Lisiani. 2011. *Persepsi Pegia Gender Terhadap Konsep Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Tentang Status Kepala Keluarga*. Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto. Di akses pada tanggal 25 Januari 2015. Melalui file pdf; [dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id](http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&Df*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono. 2010. *Teori Dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wulansari, Puji. 2011. *Peran Ganda Perempuan*. Diakses pada tanggal 17 November 2024. Melalui <http://mbaawoeland.blogspot.com/2011/12/peran-ganda-perempuan.html>.
- Yunita, Awing. 2013. *Peran Wanita Karier Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pada Wanita Yang Menjabat Eselon Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan)*. Fakultas ISIPOL, Universitas Mulawarman. Samarinda.

## **BAB II**

# **Perempuan Kepala Keluarga: Pergeseran Peran dan Konstruksi Sosial dalam Feminisme Lokal**

### **A. Pengantar**

Pada masa sekarang ini, sejatinya muncul banyak keadaan kaum perempuan yang arah pergerakannya masuk dalam ruang perubahan peran. Konteks perubahan peran akan menitikberatkan pada upaya menempatkan mereka pada pengikatan pada dimensi perbedaan yang mutlak terhadap ruang bayang kaum laki-laki. Paradigma tersebut tidak hanya terlepas dari keadaan perubahan peran saja, melainkan fungsinya perempuan dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai pendamping sejati kaum laki-laki. Sebagai pendamping kehidupan mereka tidak hanya ditempatkan pada kategori pelayan laki-laki secara subjektif, akan tetapi sebagai pembangun feminisme yang objektif. Analisa tersebut menekankan pada bagaimana sosok kaum perempuan menginginkan suatu kepatuhan terhadap identitasnya tetapi realitanya tidaklah demikian. Kepatuhan kaum perempuan tersebut ditunjukkan pada kaitan perempuan sebagai ciptaan Tuhan untuk melengkapi dan membantu kepada pendamping mereka (yaitu kaum laki-laki) dalam mewujudkan kesejahteraan bersama bukan malah terjadi ketimpangan yang mutlak.

Terlepas dari hal itu, kaum perempuan masih tampak pada dimensi pergerakan untuk berperan membangun perekonomian keluarga. Aktivitas peranannya dalam ekonomi keluarga tentu dilakukan bukan hanya sekedar mereka bekerja tetapi memang dalam perspektif kebutuhan sosial dan ekonomi telah terjadi ketimpangan dan memaksanya melakukan kegiatan demikian.

Perempuan Kepala Keluarga di Desa Wesi Sragen Jawa Tengah adalah salah satu bagian bentuk keterwakilan dari konsep feminisme lokal terhadap benturan budaya patriarki. Dalam perspektif historis perempuan selalu dikaitkan dengan budaya patriarki karena dalam dinamika perjalanannya perempuan (di) sengaja ditempatkan dalam kondisi dibawah bayang-bayang kaum laki-laki. Selanjutnya, Perempuan Kepala Keluarga dianggap kajian feminisme lokal karena mereka berada dalam lingkup kelompok suatu daerah yang secara tersirat sebenarnya masih dapat dihubungkan dengan sistem patriarki yang masih cukup kuat. Sehingga konsep budaya patriarki cenderung masih terlihat pada mereka.

Sebenarnya pandangan dimensi feminisme yang terjadi pada perempuan Kepala keluarga bukan ditafsirkan sebagai diskriminasi peran, namun demikian konteks tersebut untuk berada dalam keseimbangan kedudukan meskipun perubahan tersebut sangat bertolak belakang dengan porsi dan ruang lingkungnya. Dinamika penguatan feminisme secara penafsiran diarahkan untuk mencapai kesetaraan. Hal ini dikarenakan secara prinsip ihwal kaum perempuan mengurus semua keperluan keluarga dan rumah tangganya sedangkan kaum laki-laki porsinya hanya sebatas ketercukupan kebutuhan pokok. Perempuan Kepala Keluarga menempatkan diri pada proses pergeseran peran dalam konteks perekonomian keluarga. Hal tersebut telah mengalami kontradiksi konsep budaya patriarki dengan aktivitas yang sebenarnya dilakukan.

Kontradiksi tersebut dampak dari pelebaran kedudukannya yang tidak sebatas mengurus keluarga, akan tetapi arah mobilitas pergeseran peran untuk menyeimbangkan status dengan kaum laki-laki terus berjalan. Pada dimensi feminisme aktivitas pokoknya

adalah bahwa semua kebutuhan hidup ekonomi keluarga menjadi tanggungjawab perempuan kepala keluarga.

## **B. Dinamika Pergeseran Peran Perempuan**

Pada prinsipnya berbagai wacana masa sekarang dan masa lalu sebenarnya kaum perempuan memiliki banyak makna. Bukan hanya sebagai simbolisasi, melainkan mempunyai peran dalam membangun keseimbangan terhadap kaum laki-laki. Namun stigma perempuan dilihat secara fisik lemah sehingga semakin menguatkan pada dimensi perlakuan yang tidak adil. Perempuan sering diorientasikan negatif. Hal ini sebagai akibat peranannya hanya sebagai eksistensi dalam dimensi eksotisme. Kaum perempuan sengaja ditempatkan pada bagian terbatas memiliki ruang gerak bebas. Keterjebakan perempuan yang masih menggunakan prinsip patriarki terkadang sering menyudutkan posisi mereka.

Terlepas dari itu bahwa mereka bekerja karena mereka membutuhkan pekerjaan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok hidup mereka sendiri (Mia Siti Aminah. 2010). Kebutuhan yang tidak bersifat material tetapi non-material. Material diorientasikan kepada bentuk kebutuhan fisik, sedangkan non-material bisa menyangkut kebutuhan pendidikan anaknya. Pada konteks ini, peranan perempuan dalam ruang domestik dan publik adalah isu strategis yang menarik untuk dibahas. Isu-isu feminisme, ketidakadilan gender dan diskriminasi yang selalu diterima oleh mereka baik dari perlakuan maupun dampak psikologis. Perlakuan yang secara fisik diterima, pelecehan terhadap perempuan, peliputan yang bersifat negatif terhadapnya masih terlihat di kehidupan masyarakat. Sehingga mengubah citra negatif kaum perempuan sebagai makhluk yang masih mempunyai kelemahan. Bilamana merujuk pada Handayani dan Sugiharti menegaskan

bahwa kaum perempuan mempunyai tiga peran vital dalam menjalani kehidupan yaitu sebagai peran reproduktif, peran produktif dan peran sosial (dalam Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati, 2014: 154). Peran reproduktif arahnya pada perempuan memiliki kekuatan dalam mengurus rumah tangga dan suami. Peran produktif menekankan pada keterlibatan aktif kaum perempuan untuk menempatkan posisi ke dalam ruang publik perihal pembagian kerja.

Kaum perempuan berupaya dalam kepemilikan penopang keluarga sebagai tulang punggung keluarga. Sedangkan peran sosial mengarah pada segala bentuk aktivitas dalam kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat. Farida Harun (2011: 75) juga menguatkan pernyataan tersebut yang menghubungkan peran wanita sebagai ibu rumah tangga (IRT), pemelihara setiap anggota keluarga yang masuk dalam peran domestik ... dan berkaitan pula dengan kewajiban, pengikut dan tanggung jawab untuk memelihara. Beberapa pendapat tersebut semakin memberi penegasan bilamana kaum perempuan memiliki sisi lain yang bisa diperhitungkan. Hal ini karena secara paradigma fisik memang orientasi pada konsep kelemahan, akan tetapi jika ditelaah secara fungsi kebutuhan keluarga mempunyai peran yang begitu penting untuk menjalani kehidupan keluarga dan relasi dengan lingkungan sosialnya.

### **C. Dinamika Peran Perempuan keluarga dan ekonomi**

Budaya patriarki akan selalu dihubungkan dengan feminisme. Feminisme akan berfungsi pada perjuangan hak-hak perempuannya akan kebebasan dalam keterbelengguan perempuan atas kuasa laki-laki. Keterbatasan yang sangat menekan mereka membuat stigma sosial bahwa kaum perempuan dikategorikan tidak memiliki peran apapun sehingga tidak mempunyai akses

kebebasan. Pandangan tersebut tetap ingin di stigmakan kaum laki-laki dengan memandangnya dari segi kebutuhan fisik yang dapat membuatnya menjadi lemah.

Eksistensi perempuan dalam kontribusi perannya diungkapkan pada keterlibatan mereka dengan memperhatikan keinginan untuk mendapatkan pengakuan agar diterima perannya. Untuk itu, perempuan dan ungkapan identitas peran harus disesuaikan dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Jika kondisi tersebut dilakukan maka dapat membuka diri pada pelepasan ruang keterbelengguan patriarki. Apa yang dijalankan oleh kaum perempuan tersebut menjadikan titik tekan patriarki dan semakin menggerakkan mobilitasnya.

Selanjutnya, peran kaum perempuan mengindikasikan sebagai peran yang laten. Kaum perempuan dinarasikan bahwa meskipun mereka sebenarnya terkekang akan tetapi mereka pun selalu berproses dalam menjalankan peran dan fungsinya yang baru dalam kehidupan masyarakat dan tidak pernah menampakkan status dan kedudukan dengan kaum laki-laki. Sehingga kaum perempuan mempunyai peran ganda yaitu perempuan untuk ibu rumah tangga (sebagai bagian dari kittahnya), kaum perempuan melakukan akses relasi dengan lingkungan sekitar untuk hidup bermasyarakat secara damai, dan kaum perempuan diupayakan untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya sebagai perempuan sejati.

Selanjutnya, masih adanya bayang-bayang konsep marginal kaum perempuan berusaha untuk menunjukkan pergerakan aktivitas yang aktif dalam berbagai hal. Meskipun kaum perempuan terus dipengaruhi dampak patriarki namun tidak mengurangi aksesibilitas dalam kehidupan masyarakat dengan spesifikasi pekerjaan yang mereka tekuni. Muncul sebuah pola bahwa kaum Perempuan akan selalu bergerak untuk memperbaiki

status sosial. Situasi ini dimungkinkan sebagai upaya untuk menerapkan konsep perjuangan feminisme dan juga adanya ungkapan ketidakterimaan mereka yang selalu dipandang lemah dan tidak mempunyai daya. Bahkan wujud perilaku tersebut dapat ditunjukkan dengan pelibatan kaum perempuan menjadi penopang ekonomi dan mengubah dominasi siklus spesifikasi kerja bahwa yang berperan penting adalah perempuan, utamanya kaum perempuan kepala keluarga.

Veeger dalam (Bagong Suyanto, 2014: 258-259) mengungkapkan bahwa poin penting dari hasil kerja yaitu terletak pada kepuasan, penghasilan dan kehormatan sehingga mereka akan merasa terhormat jika telah berhasil. Sebagai sebuah simbolisasi berkenaan peran pembangunan ekonomi keluarga yang tidak seimbang dan memunculkan kelemahan perannya berdampak pada bentuk perlakuan yang kurang adil. Hal ini dipengaruhi dari persepsi yang muncul sebagai akibat dari beberapa hal, yaitu minimnya memahami paradigma terhadap feminisme perempuan. Karena orang lain memandang kaum perempuan mempunyai kelemahan fisik. Sehingga dianggap tidak memiliki daya tahan untuk melakukan perihal yang tidak bisa dikerjakan.

Kemudian, terdapat perbedaan peran yang terlihat dari pemantapan *mindset* kaum laki-laki melihat kaum perempuan tidak bisa diandalkan sehingga terjadi doktrin terhadap wataknya pun muncul. Diperolehnya bentuk doktrin tersebut adanya unsur kesengajaan bahwa sikap mendoktrin itu berlangsung secara mengalir tatkala menyebut perempuan itu tidak mempunyai daya kekuatan secara status, kedudukan dan struktur sosial. Begitu sebaliknya, orientasinya bahkan terdapat pemaksaan peran dari kaum laki-laki sebagai bagian potret hidup yang lemah dengan melihat dari unsur eksotismenya saja. Kajian feminisme sekarang

ini kurang memberikan ruang perempuan pada keseimbangan peran. Hirman Sahapudin (2012) mengungkapkan bahwa:

Kajian feminisme modern hingga saat ini belum terjadi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan dilihat dari masih muncul anggapan bahwa perempuan memiliki keterbatasan fisik dan mental yang kemudian berpengaruh pada hal pembagian peran dan perlakuan dalam masyarakat. Karena anggapan itu maka perempuan dianggap tidak layak menempati posisi tertentu.

Pandangan tersebut ini menyebutkan bahwa paradigma modernisme cenderung berpihak dalam konotasi marginal terhadap peran perempuan. Kelemahan fisik dan mental telah menjadi sandungan utama yang membuat dampak spesifikasi peran kerja dan upaya perilaku penyingkiran di masyarakat oleh kaum laki-laki. Konsep pemikiran berpaham tradisional menjadi bagian terpenting perihal dominasi peran budaya patriarki terhadap eksistensi perempuan. Orientasi tersebut memperlihatkan hubungan yang erat dengan paham antara patriarki dan garis keturunan laki-laki (patrilineal) yang selalu bersamaan. Itu artinya, ketidakleluasaan kaum perempuan menghadapi stigma keterbelengguan dimulai dari kitalah perempuan sebagai penganut paham patrilineal tersebut. Hal ini sama dengan konsep dinamika hidup kaum perempuan dalam perspektif Jawa yang nilai-nilai keterbelengguan diawali dari garis keturunan adat (kebiasaan) yang menutup ruang akses mereka untuk berekspresi.

#### **D. Perempuan Kepala Keluarga: Kajian Peran Konstruksi Sosial**

Memaknai perempuan kepala keluarga berarti menyebutkan pada perempuan sebagai pemikul tanggung jawab, pemimpin keluarga atau mungkin dominasi peran istri terhadap keluarganya.

Beberapa istilah tersebut dapat diterima mengingat penjabaran tersebut menempatkan posisi tawar perempuan (istri) lebih mendominasi terhadap fungsi dari suami (kaum laki-laki), terutama menyangkut persoalan sosial dan ekonomi. Semua tanggung jawab keluarga dibebankan atau dipikul oleh perempuan. Sehingga Julia Cleves menyebut perempuan kepala keluarga sebagai *women headed* (dikepalai oleh perempuan) atau *women maintained* (dijaga perempuan) yang merupakan kaum perempuan menjadi tonggak tanggungjawab tunggal untuk menghidupi keluarganya dalam sehari-hari (2007: 55). Dengan demikian sebenarnya proses cuku beralasan jika ada suatu pergeseran peran kitta keluarga yang semestinya suami (laki-laki) beralih ke istri (kaum perempuan) yang identik sangat kuat.

Selanjutnya, konteks realitas yang dihadapi masyarakat sekarang justru yang menjadi perempuan kepala keluarga adalah dengan status ekonomi dan pendidikan yang rendah. Kondisi sosial tersebut didominasi keterbatasan ekonomi yang membutuhkan peningkatan kecukupan untuk pemenuhan keluarga mereka. Tingkat ekonomi yang cukup rendah membuat peran mereka dalam perubahan sentra penguatan ekonomi non-domestik menjadi dominan. Pekerjaan yang dilakukan tidak hanya di lingkungan masyarakat setempat, bahkan untuk menyambung hidup ekonomi, mereka berupaya untuk mencari nafkah di luar ruang domestiknya. Hal tersebut juga yang dialami dari perean kepala keluarga di Desa Wesi Sragen Jawa Tengah. Mereka mengubah status dan kedudukan agar dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga. Peran ganda sebagai *women headed* dilakukan dipengaruhi pula dengan keadaan hidup yang begitu sulit dan keterbatasan pendapatan dari suami mereka sehingga mau tidak mau pekerjaan yang sebenarnya menjadi tanggungjawab suami akan bergeser pada mereka.

Secara implisit rencana mereka untuk membantu perekonomian hanya sebatas dalam untuk mengurangi beban perekonomian oleh suami mereka. Namun demikian kebiasaan yang sudah dilakukan dan juga didorong oleh ketidakmampuan kaum laki-laki dalam menopang kehidupan perekonomian keluarganya maka apa yang dikerjakan menjadi suatu tanggung jawab yang sejati. Akan tetapi realitas yang dihadapi justru menempatkan mereka ke ruang sosial yang sempit. Pengakuan dan hak status sangat jarang diterima oleh kaum perempuan. Ruang sosial lebih memberikan pengakuan terhadap kaum laki-laki bahwa merekalah yang mempunyai dominasi terhadap apa yang terjadi di keluarga mereka.

Meskipun kaum perempuan kepala keluarga telah membebaskan diri dari ikatan patrilineal dan patriarki, tetapi hal itu tidak dirasa cukup untuk melepaskan pengakuan terhadapnya. Minimnya respons pengakuan tersebut membuat pergeseran peran dan kedudukan dari kaum perempuan semakin dominan. Hal ini pula akan mengubah pandangan konstruksi sosial berbanding terbalik yaitu kaum perempuan identik dengan peralihan kodrat sebagai ibu rumah tangga dan ketimpangan-ketimpangan sosial seperti pencari nafkah sebagai peran gantinya semakin dominan. Sehingga realitas dalam keterbanguan konstruksi sosial belum tentu berpihak pada perempuan kepala keluarga.

#### **E. Konstruksi sosial dan pembedaan gender**

Tolak ukur sebutan perempuan kepala keluarga tidak hanya menggambarkan suatu dilematis kodrat sebagai perempuan, akan tetapi sebutan tersebut dilekatkan dalam dinamika pergeseran peran mereka dalam dominasi lingkup domestik dan non-domestik. Kedua hal tersebut berperan dalam membentuk perempuan kepala keluarga menjadi peran ganda dengan

pengakuan keterbatasan dari segala apapun mulai dari ketidakberdayaan ruhani, jasmani dan paradigma berpikir. Sesuai keadaan tersebut, menguatkan peran perempuan sebagai pembangun perekonomian keluarga. Kurang responsifnya laki-laki (suami) yang belum dominan penuh untuk penopang perekonomian, mengubah persepsi masyarakat dengan idiom perumpamaan bapak rumahan, istri banting tulang mencari naskah.

Perihal tersebut bisa diterima karena perempuan kepala keluarga mempunyai ruang bebas dalam ikut serta membantu meningkatkan pendapatan. Sehingga gambaran tersebut, menempatkan perempuan kepala keluarga berperan strategis untuk berada dalam dinamika kehidupan ekonomi dan sosial yang sangat berkembang pesat. Selayaknya proses maka capaian yang terealisasi diwujudkan pada pergeseran peran dan fungsi sosial dan ekonomi dengan sekitar potensi ekonomi lingkungannya. Hal ini dikarenakan persaingan dan kemajuan kaum perempuan telah menasbihkan pada kesetaraan dan harmoni terhadap kaum laki-laki. Maka dari itu, keterbangunan konstruksi peran sosial dalam wacana harmonisasi perspektif masyarakat mempunyai hubungan yang berdampingan. Apalagi dipandang masyarakat, dengan relasi sosial yang sangat kuat, terhadap ruang konstruksi sosial menjadi perbandingan yang dipersepsikan dalam berbagai sudut pandang. Sejak awal memang ruang telaah konstruksi sosial terhadap perempuan kepala keluarga sebagai akibat dari hubungan ketidaksetaraan dan marginal yang kemudian dipersepsikan orang lain sangat negatif, akan tetapi dalam realitanya justru memberikan relasi kekuatan yang luar biasa dengan kemampuan kaum perempuan memberikan citra yang tegar dan berada pada posisi tidak termarginalkan.

Kiprah perempuan dalam perkembangannya bisa melepaskan dari subordinasi kaum laki-laki (suami) mereka. Keleluasaan kiprah mereka berdampak pada pengakuan yang hakiki terutama menyangkut sektor perekonomian keluarga. Kemampuan mengambil keputusan, kebebasan bergerak dan bertindak atau berperilaku sudah mulai terberdayakan. Sehingga peran sosial pada perempuan kepala keluarga sudah bergerak otonom dengan mengandalkan keterampilan yang dimampunya yang kemudian kesetaraan sosial mengenai status dan kedudukan berada pada posisi akses yang sama. Dengan demikian menarik untuk menyinggung permasalahan konstruksi sosial dengan perempuan kepala keluarga, mengingat konteks munculnya konstruksi sosial dimulai dari tekanan kaum perempuan budaya patriarki yang selama ini membelenggunya.

Sehingga arah berikutnya jika pandangan patriarki telah menjelma pada keputusan penerimaan kelakuan yang tidak adil, maka ruang-ruang pembedaan sangat berpeluang. Dampak yang diterima selanjutnya tentu akan membentuk persepsi dan stigma dan akan mempengaruhi sikap dan tindakannya. Suatu analisa mendalam oleh Freire yang menyebutkan bahwa tatkala terdapat pandangan ketimpangan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam bentuk hubungan kelas, gender dan lainnya yang selanjutnya muncul dehumanisasi (Willian A. Smith, 2001: 2).

Kajian peran perempuan kepala keluarga digunakan analisa pendekatan teori konstruksi sosial yang kemudian berlangsung hingga ke dialektika pelabelan seseorang (stigma). Analisa konstruksi sosial yang ditawarkan oleh peter L. burger dan Thomas luckman berpandangan jika proses sosial akan dengan sendirinya dibentuk melalui tindakan dan relasi sosial individu yang terus menerus menciptakan kondisi realitas yang dialami bersama secara subjektif. Konteks tersebut akan selalu muncul dialektika hubungan

timba balik bagaimana baik kelompok masyarakat dan individu dalam posisi saling menciptakan yang kemudian dibentuk dan dibantu dengan adanya relasi (hubungan) dengan lingkungan setempat.

Lingkungan akan mempengaruhi proses dialektika diantara keduanya yang mana tempat lingkungan digunakan untuk kebebasan dan keleluasaan melakukan ekspresi dalam bentuk sosialisasi, kerja sama dan pembentukan pranata sosial. Pandangan peter L. buger bahwa konstruktivis dibangun berdasarkan konsep realitas sosial yang berkelanjutan (peter L burger dan Thomas Lukcan, 2013: 19-28). Kondisi realitas tersebut memberi pengaruh terhadap keberadaan perempuan kepala keluarga. Realitas akan saling berhubungan dengan fakta sosial. Fakta sosial tersebut akan membentuk sebuah pandangan dan *labeling* terhadap individu tersebut, bahkan kelompok. Kemudian pelabelan tersebut cenderung meniadakan pengakuan pada diskriminasi gender sehingga menentukan batas-batas tradisi dan aturan nilai sosial dan identitas gender. Perbedaan gender pun makin dirasakan dan kadang malah memberikan ruang pembedaan gender. Pembedaan gender merupakan sistem yang mana laki-laki terutama kaum perempuan yang menjadi korban dalam ruang sistem tersebut (Mansour fakih, 2008: 12). Oleh karena itu, manifestasi perubahan dari pandangan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu

- a. Secara dinamik mengubah kebebasan kelompok alienansi

Sebenarnya konsep ini memberikan keterbatasan ruang kaum perempuan dalam batas dipinggirkan yang dalam realita maknanya adalah perempuan secara kodrat selalu berurusan dengan peminggiran statusnya di masyarakat. Posisi tersebut kemudian berubah tatkala melihat sisi perempuan kepala keluarga. Perempuan kepala keluarga telah merubah paradigma tersebut sehingga pengakuan untuk peran keluarga sebagai tulang

panggung keluarga terus menguat. Pelekatan identitasnya pun juga berubah.

Peran ganda tidak hanya termanifestasikan dalam area mengurus keluarga, namun justru dianggap mempunyai beban ganda. Mengurus keluarga dengan aktivitas rumah, mengurus suami, anak, pendidikan anak, pendamping keluarga pun juga dilakukan. Sehingga secara tidak langsung pelekatan peran marginal pun ditiadakan meskipun beban kerja berat dipikul oleh mereka.

b. Mengubah penempatan posisi perempuan yang tidak subordinasi

Posisi perempuan bila dipandang dalam perspektif subordinasi bahwa mereka dianggap tidak mempunyai peran penting dalam siklus kehidupan keluarga. Anggapan yang sering dilekatkan pada kaum perempuan terutama menyoal pembagian spesifikasi kerja maka akan muncul istilah-istilah tidak berpengaruh, berada di kedudukan yang paling bawah, atau tidak diunggulkan karena sifat kelemahan tenaga dan mental yang kurang mendominasi.

Namun demikian, apa yang dilakukan oleh perempuan kepala keluarga justru membalikkan realita yang semakin menguatkan peranannya begitu penting tatkala menyoal tentang perekonomian keluarga. Mereka telah menaikkan daya tawarnya semakin diperhitungkan dan kaum laki-laki bersedia mengakui kemampuannya.

c. Meleburnya masalah stigma

Analisa tersebut sangat beralasan terhadap peran ganda perempuan kepala keluarga yang sebelumnya selalu dibawah bayang kaum laki-laki namun perihal tersebut kemudian bisa ditolak. Kepercayaan terhadap status dan kedudukan terhadap

kehidupan perempuan kepala keluarga tidak bisa dihindari. Perluasan kebebasan dalam melawan diskriminasi terhadap patriarki yang selalu membelenggu kulturnya dalam perkembangannya hilang.

Dominannya partisipasi perempuan kepala keluarga dalam menyikapi maupun pengambilan keputusan untuk profesi tambahan sebagai penggerak ekonomi keluarganya dirasa mempunyai keuntungan tersendiri bagi mereka. Semakin hilangnya stigma-stigma negatif mampu di konstruksi kembali melalui tindakan-tindakan diluar batas ekspektasi orang pada umumnya. Meskipun nanti kepercayaan orang masih bersifat dinamika, tetapi bagi perempuan kepala keluarga tugas untuk menghidupi keluarga dan menguatkan peran ekonomi merupakan pekerjaan yang secara sadar menjadi pekerjaan yang ilahiah.

#### **F. Memaknai PEKKA Dan Perempuan Kapuk Sebagai Kajian Feminisme Lokal**

Makna feminisme lokal akan berhubungan dengan paham penyetaraan hak dan kedudukan terhadap kaum laki-laki dengan mewujudkan ke dalam bentuk aktivitas, ide dan relasi sosialnya. paham penyetaraan bukan hanya dalam konteks strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi, akan tetapi bagaimana kontribusi kaum perempuan terhadap pembangunan keluarga, masyarakat dan konsep diri dengan penguatan identitas sebagai perempuan kuat dan tidak lemah. Artinya terdapat dua hal bagian yang merupakan tugas utama kaum perempuan sebagai bagian dari manifestasi feminisme yaitu pertama bagaimana perempuan tersebut mempunyai tugas ganda sebagai istri, mengurus suami, aktivitas rumah tangga dan pergeseran nilai-nilai peran perekonomiannya, dan kedua menguatkan konsep diri dalam identitas sosialnya sehingga akan mengurai sigma sosial negatif

sehingga sedikit mengubah arah keterbentukan stereotip yang berkontribusi tanpa diskriminasi peran.

Sebagai sebuah bentuk feminisme lokal maka konsep tersebut akan merujuk pada suatu proses perjuangan terhadap menyetarakan ruang statusnya dalam berbagai aspek kehidupan yang menyesuaikan konteks lokal. Konteks lokal bukan hanya semata-mata nilai-nilai kearifan lokal tetapi lebih merujuk dalam bangkitnya nilai-nilai keutamaan kitta perempuan yang mempunyai hak yang sama dengan semua manusia lainnya. Kajian antara PEKKA (perempuan kepala keluarga) dan Kaum perempuan Kapuk (penjual kapuk/kapas) dirasa mempunyai hubungan yang sama dengan pembahasan masalah proses feminisme lokal. Dalam hal ini perempuan kepala keluarga di daerah Wesi Sragen dan perempuan Kapuk di Desa Tapelan Bojonegoro merupakan representasi dari kaum perempuan yang memiliki konsep perjuangan feminisme dan perjuangan hak gender. Prinsip kesamaan tersebut dapat dijelaskan dalam wujud perolehan status sosial pada perihal emansipasi gender. Diperolehnya konteks persamaan gender yang luas faktanya cenderung melalui pergeseran peran yang tujuannya untuk terpenuhinya sumber ekonomi keluarga.

Adanya realita tersebut berpengaruh langsung terhadap stereotip mereka. Khususnya pada perluasan pergeseran peran yang merawat, menanggung dan mengatur semua keperluan keluarga. Fakta tersebut semakin memberi penegasan bahwa menyoal perubahan peran masih dijumpai dalam kehidupan masa kini. Mereka bukan hanya sebagai kontrol keluarga tetapi justru ikut berperan aktif sebagai pelaku ekonomi dalam mencari nafkah keluarga. Fenomena yang terjadi pada prinsipnya tidak hanya dilihat dalam perspektif terbebani masalah ketidakadilan gender, akan tetapi perlu dipandang dari kebutuhan hidup dan kebiasaan

yang telah membudaya. Dalam perspektif kebutuhan hidup memang perihal yang sangat penting ketika dihadapkan pada masalah pemenuhan hidup yang berkelanjutan dan sifat manusia yang keinginannya tidak terbatas serta dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah.

Sehingga mau tidak mau mereka perlu mengupayakan keseimbangan kebutuhan hidup yang tidak cukup kemudian beralih dengan menggeluti bidang ekonomi dengan melakukan pekerjaan dengan spesialisasi kerja yang ada (sebisanya). Misalnya, serabutan, berdagang, kuli bangunan, dan sebagainya. Dalam perspektif aktivitas yang telah menjadi budaya dimaknai jika mereka (kaum perempuan) melakukan tanggung jawab pekerjaan sebagai penopang utama ekonomi keluarga telah melakukan aktivitas tersebut sejak lama dan dibudayakan suatu kelompok masyarakat bahkan sampai turun-temurun.

Konteks dibudayakan bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pertama mereka berada pada ruang pekerjaan tersebut sengaja untuk mencukupi kebutuhan, kedua mereka tetap ingin eksis dalam pekerjaan itu memang karena tidak peluang bidang kerja lain, keterbatasan SDM, atau untuk menjaga kekhasan dalam ruang publik mereka, ketiga, memang suatu kondisi hidup yang mengharuskan kaum perempuan untuk berperan dalam pencari nafkah, dan empat untuk menunjukkan keadilan gender. Pada prinsipnya fakta feminisme lokal yang masih muncul dari cerminan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Wesi Sragen dan Perempuan Kapuk di Desa Tapelan Bojonegoro menjadi isu penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan tidak ada pembedaan hak sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Sederhananya, kaum perempuan tidak selamanya ditempatkan dibawah status dan ruang strata kaum laki-laki, sehingga seiring perkembangan zaman dan akan disertai dengan

pola kehidupan yang kompleks, tetapi kenyataannya sudut pandang tersebut masih memperlihatkan marginalisasi gender termasuk masalah ketidakadilan (Khoirul Huda dan Anjar Mukti Wibowo, 2017: 3). Pernyataan tersebut membuka ruang bahwa sifat kehidupan yang terus berdinamika, tidak di pungkiri akan pula terjadi suatu perubahan peran, status dan kedudukan kaum perempuan terhadap upaya meniadakan ketidakadilan dan eksistensi posisi perempuan maju selangkah ke depan. Realita demikian jangan sampai menimbulkan kebencian, konflik, dan menekan untuk semakin mendiskriminasi kaum perempuan. Justru sudut pandang nilai etika dalam mengambil keputusan untuk terus berjuang demi kehidupan keluarganya patut menjadi inspirasi meskipun kadang dengan perhitungan risiko yang sangat tinggi. Karena harus meninggalkan keluarga, pendidikan anak kurang mendapat perhatian, masalah kebijakan rumah tangga kurang terurus, dan bahkan relasi sosial dengan lingkungan sekitar terabaikan. Hal ini karena posisi mereka fokus pada pekerjaan yang mengharuskan untuk terus menghidupi keluarganya untuk mencari nafkah guna mendapatkan keseimbangan kesejahteraan yang lebih baik.

## Daftar Pustaka

- Bagong Suyanto.2014. *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme Dan Konsumsi Di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Farida Hanum. 2011. Peran Wanita Dalam Membangun Masyarakat Berkeadilan Gender. *Jurnal Sosiopublika*. Volume 1 Nomor 1 Oktober 2011: 75-85
- Hirman Sahapudin. 2012. Perempuan dititik Nol dalam Kajian Feminisme Sastra dalam <http://hirmansahapudin2.blogspot.co.id/2012/10/kajianfeminisme.html> diakses 20 Agustus 2017
- Julia Cleves Mosse. 2007. *Gender Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Khoirul Huda dan Anjar Mukti Wibowo. 2017. *Perempuan Kapuk: Dinamika Perubahan Peran Ekonomi Dan Budaya Dalam Feminisme Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Mansour Fakih. 2008. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mia Siti Aminah. 2010. *Muslimah Career Mencapai Karir Tertinggi Dihadapan Allah, Keluarga, Dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Gratama
- Ni Made Diska Widayani Dan Sri Hartati. 2014. Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi UNDIP*. Volume 13 Nomor 2 Oktober 2014: 149-162.
- Peter L. Berger dan Thomas Lukcman. 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES. 19-28

Willian A. Smith. 2001. *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Terjemahan Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

## BAB III

# Paradigma Perempuan sebagai *Inclusive Citizenship* dan Diskursus Hak Perempuan dalam Perspektif Pancasila

### Pengantar

Sebagai bagian dari Warganegara Indonesia Perempuan sudah sepatutnya mendapat perlakuan dan pengakuan hak-hak yang sama dengan laki-laki. Namun fakta yang dapat kita lihat adalah terdapat suatu diskursus mengenai hak-hak perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari dikotomi yang bahwa selama ribuan tahun perempuan terus menerus dianggap sebagai warganegara kelas dua dan berada di bawah laki-laki (*thesecond rate communities*) yang mengharuskan perempuan untuk selalu tunduk lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki dan hegemoni mereka demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga.

Namun hal tersebut tersebut mulai berubah ketika adanya pergeseran peran antara perempuan dan laki-laki di masyarakat di Indonesia baru-baru ini. Pergeseran peran tersebut membuat perempuan bergeser perannya menjadi Kepala rumah tangga, sedangkan laki laki berganti peran mengurus rumah tangga. Hal itu dianggap tabu bagi sebagian masyarakat, karena menurut mereka tugas pokok perempuan mengurus semua keperluan keluarga dan rumah tangganya sedangkan kaum laki-laki porsinya hanya sebatas ketercukupan kebutuhan pokok. Hal tersebut akan coba di kaji dari sudut pandang *Inclusif citizenship* dan mengkaji menggunakan nilai-nilai pancasila.

Pengkajian menggunakan konsep *inclusif citizenship* dianggap penting karena perempuan merupakan bagian dari warganegara

yang memiliki hak setara dengan laki-laki. Sedangkan pancasila merupakan benteng pertahanan pertama dari nilai-nilai yang berasal dari luar. Sehingga pancasila di fungsikan sebagai filterisasi untuk itu maka hak-hak perempuan ini juga akan di kaji menggunakan perspektif pancasila.

#### **A. Perempuan sebagai *Inclusive Citizenship***

Dalam pengumpulan politik di Indonesia terdapat beberapa kecenderungan yang di alami warganegara khususnya perempuan. Hal ini terjadi karena adanya anggapan lama masyarakat yang menganggap bahwa rana publik lebih cocok di berikan kepada seorang laki-laki. Contoh dalam menyelesaikan suatu konflik, perempuan sering kali di pandang sebelah mata untuk mengambil peran sentral. Beberapa sebab mengapa itu terjadi yakni sebenarnya bukan karena ketidak mampuan secara intelektual melainkan lebih kepada faktor-faktor lain yang bersifat teknis (2005 dalam Jones 2011).

Padahal dalam penyelesaian konflik sebenarnya perempuan dapat mengambil peran sentral, hal itu dikarenakan jumlah perempuan yang cukup banyak, sehingga patut di akomordir pandangannya. Kedua perempuan dapat bertindak secara praktis terkait dengan konflik, dengan memainkan peran dan kebiasaan sehari-hari dalam keluaganya dengan menyisipkan pesan-pesan positif kepada lingkungan sekitarnya. Ketiga perempuan dianggap sebagai orang yang rentan menjadi korban dalam situasi konflik, dengan memasukan perempuan dalam proses perdamaian harapannya perempuan dapat di akui perannya sehingga tidak selalu menjadi korban.

Keempat, ketika terjadi konflik jangka panjang perempuan sering kali menerima dampak negatifnya, misalnya ketika keadaan memaksanya untuk mengambil alih peran sebagai kepala rumah

tangga karena suaminya tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga. Fenomena ini menjadi suatu yang ramai di bicarakan akhir-akhir ini, terkait kepatutan ya di mata masyarakat dan norma-norma yang ada di Indonesia. Untuk itu mengenai gender kini hendaknya harus di pandang dalam konsep *inclusive citizenship*, yang merupakan pemberian kebijakan pemerintah kepada warganegara untuk mendapatkan persamaan pelayanan, kesempatan dalam berdemokrasi, dan hak hak lainnya.

## **B. Perempuan dan Pancasila**

Sebagai seorang warga negara maka perempuan, dapat dikaji lebih lanjut menggunakan konsep T.H. Marshall yang membagi elemen kewarganegaraan menjadi tiga bagian yakni hak sipil (seperti kebebasan individu), hak politik (seperti hak partisipasi politik), dan hak sosial (seperti menikmati kesejahteraan). Meski secara teori hak dari perempuan terlihat sangat luas dan universal namun sayangnya pada kenyataannya masih terdapat hak yang termarginalkan dan tidak mengakui hak hak kewarganegaraan yang di miliki perempuan (Tupper 2002). Misalnya dalam masyarakat Indonesia Baru-baru ini terdapat fenomena yang unik, yakni bertukar nya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Jika kita kaji fenomena tersebut menggunakan hak kewarganegaraan TH Marshall maka tidak ada permasalahan, karena baik laki-laki maupun perempuan merupakan warganegara yang sama-sama memiliki hak sosial. Jika dengan pergantian peran antara laki-laki dan perempuan di dalam suatu rumah tangga membuat mereka bisa mencapai kesejahteraan sosial maka tidak perlu di risaukan. Namun pada faktanya banyak dari masyarakat yang menilai fenomena tersebut tidaklah cocok, dan tidak etis, karena banyak masyarakat yang ter dogma bahwa

perempuan bertugas di rumah sedangkan laki-laki bertugas untuk mencari nafkah.

Dengan meningkatnya pemahaman manusia akan HAM, mendorong manusia untuk mempraktikkan konsep HAM dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk pada kajian mengenai kesetaraan gender (Wanita/Pria), selain HAM perkembangan mengenai kesetaraan Gender juga dipengaruhi munculnya paham *Feminisme* yang mengkaji hak wanita untuk dapat setara dengan pria. Dari berbagai konsep pemikiran mengenai gender tersebut, pada akhirnya hendak memberikan suatu kesetaraan bagi Pria/Wanita untuk dapat memiliki kesamaan hak dalam berbagai macam aktivitas yang ada, dimana pada kajian ini akan di fokuskan pada bahasan adalah kesetaraan gender dalam hal profesi/pekerjaan.

Perkembangan kesetaraan gender dalam pekerjaan sebenarnya cukup positif di Indonesia, hal itu dapat dilihat berbagai profesi yang dahulu dianggap hanya untuk pria sekarang juga di lakukan oleh Wanita. Seperti: Sopir Bus, Monitr mesin, bahkan sampai tukang tambal ban. Terjunnya wanita dalam berbagai macam profesi tersebut membuat pergeseran peran mereka dalam rumah tangga, dahulu wanita berperan besar dalam rumah tangga mulai dari memasak, mengurus anak, membersihkan rumah, mencuci baju sementara pria hanya bertugas mencari nafkah. Sekarang terdapat fenomena unik dimana seorang wanita yang bertugas mencari nafkah sedangkan seorang pria menjadi pengurus rumah.

Untuk itu pada bagian pertama ini akan di bahas secara mendalam bagaimana pandangan pancasila terkait fenomena perempuan sebagai kepala rumah tangga. Pandangan pancasila terkait hal itu dirasa penting karena pada dasarnya pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sehingga implikasinya yakni

semua warganegara Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai dasar pertimbangan dalam berperilaku dari hasil pengembangan sila-sila Pancasila termasuk dalam memandang etis atau tidaknya fenomena wanita kepala rumah tangga. Berikut uraian lengkap tiap-tiap sila Pancasila:

### **1. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sila pertama ini adalah wujud pengakuan rendah hati dan rasa syukur yang besar akan limpahan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa, hal ini merupakan wujud pengakuan bahwa pemenuhan cita-cita kemerdekaan NKRI serta mewujudkan kehidupan bangsa yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memiliki kewajiban moral etis yang di pikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa Indonesia bukan semata-mata di hadapan sesamanya melainkan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Latar belakang munculnya sila ini merupakan hasil kajian bahwasanya semenjak zaman purbakala hingga kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia tidak lepas dari kepercayaan terhadap kekuatan lain di atas manusia. Sehingga pada sila ini juga mengisyaratkan kewajiban warganegara Indonesia untuk memiliki agama, karena negara Indonesia di jalankan atas Ketuhanan YME maka paham Ateis tidak diperkenankan di Indonesia.

Terkait dengan kajian gender maka dapat di pahami bahwa penerapan sila pertama Pancasila ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semua di anggap sama dan sama-sama memiliki hak dan kewajiban untuk beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tidak ada batasan yang mengatur suatu agama tertentu untuk gender tertentu, tentu kebebasan ini dapat di maknai bahwa dalam hal memeluk agama (Ketuhanan YME) Indonesia telah menggunakan konsep kesetaraan gender. Termasuk dalam hal pekerjaan di rumah tangga tidak ada batasan yang diberikan Pancasila terkait dengan gender dan agama.

Sehingga mengenai layak tidaknya konsep perempuan kepala rumah tangga dalam pancasila akan di kembalikan lagi kepada individu dan agama-agama yang dipercayai oleh masing-masing masyarakat. Berikut uraian singkat pandangan fenomena perempuan kepala rumah tangga dari agama-agama yang ada di Indonesia

a. Islam

Dalam penerapan kesetaraan gender di agama Islam terdapat perbedaan berbagai macam hak dan kewajiban beribadah yang berbeda antara kaum laki-laki dan perempuan, misalnya pada islam Laki-laki memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah solat jumat, sedangkan bagi perempuan tidak. Sedangkan bagi perempuan haid tidak di perbolehkan solat dan puasa, namun hal itu tidak terjadi pada laki-laki. Meski ada perbedaan hak dan kewajiban dalam beribadah di agama islam, hal ini tidak berarti agama islam tidak mengedepankan kesetaraan gender, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif islam justru memandang sama antara laki-laki dan perempuan hal itu di ungkapkan Nasaruddin Umar yang mengkaji ayat-ayat alquran dan menemukan beberapa hal terkait kesetaraan gender yakni: (1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam surat al-Hujurat (49): 13 dan al-Nahl (16): 97; (2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Hal ini terlihat dalam surat al-Baqarah (2): 30 dan al-An'am (6): 165; (3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial seperti terlihat dalam surat al-A'raf (7): 172; (4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Kejelasan ini terlihat dalam surat al-Baqarah (2): 35 dan 187, al-A'raf (7): 20, 22, dan

23.; dan (5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi seperti yang terlihat dalam surat Ali 'Imran (3): 195, al-Nisa' (4): 124, al-Nahl (16): 97, dan Ghafir (40): 40 (Nasaruddin Umar, 1999: 248-265).

Sedangkan dalam hal rumah tangga kewajiban moril antara suami istri tidak tepat apabila di sebut dengan kata kesetaraan, tetapi akan lebih cocok disebut dengan keharmonisan. Karena pada dasarnya secara moril suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, sedangkan istri wajib untuk menurus kebutuhan rumah tangga untuk anak dan suaminya. Meski demikian tidak serta merta dapat dikatakan bahwa laki-laki tidak boleh mengurus urusan rumah tangga. Dalam HR. Bukhari disebutkan bahwa Aisyah binti Abu Bakar Radhiallahu anhumma pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. "Apakah yang Nabi lakukan ketika berada di rumah bersama istrinya?" Ia menjawab, "Dahulu Nabi biasa membantu pekerjaan rumah keluarganya.". Membantu pekerjaan rumah keluarganya tentu saja meliputi hal apa saja yang boleh jadi istri butuh bantuan. Contoh sederhana seperti mencuci pakaian, menjemurkan pakaian, sampai pada tahap paling kecil, menyapu rumah dan memandikan anak-anak. Hal ini terkonfirmasi dalam hadits yang lain. Suatu waktu, Urwah bertanya kepada bibinya Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika ia bersamamu (di rumahmu)?" Aisyah berkata, "Ia melakukan (seperti) apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya & mengangkat air di ember." (HR. Ibnu Hibban).

Sehingga dalam perspektif islam secara moril tidak dibenarkan bahwa perempuan/seorang istri menjadi kepala rumah tangga dan perannya di rumah tangga di gantikan oleh sang suami, namun hal tersebut tidak serta merta perempuan tidak boleh membantu sang suami mencari nafkah atau sang suami membantu istri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Karena pada dasarnya yang ditekankan adalah konsep keharmonisan dalam rumah tangga.

b. Kristen

Dalam agama Kristen kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari bahwa keduanya sama-sama memiliki kesempatan dan kuasa untuk dapat beridentitas dalam masyarakat sebagai sintua, pendeta, walikota, gubernur, bahkan menjadi presiden. Gambar yang rinci tentang kesempatan untuk berperan bagi perempuan dalam masyarakat diberikan misalnya dalam Ams. 31: 10 - 31. Kemudian dari perspektif laki-laki, seorang laki-laki bertindak aktif sebagai "penyesuai" yang mampu menyesuaikan diri berdasarkan kekhasan dan karunia yang memang di miliki oleh laki-laki, misalnya kekuatan fisik. Sehingga bilamana istri membutuhkan bantuan dalam hal fisik sang suami dapat membantunya. Kemudian bilamana istri juga bekerja dan memiliki profesi dalam masyarakat maka seorang laki-laki dapat mengambil peran dalam pekerjaan rumah tangga seperti mendidik anak, mempersiapkan makanan, bahkan belanja ke pasar.

Dalam hal ini jangan sampai mengidentikkan kodrat perempuan dalam melahirkan dengan pekerjaan rumah tangga. Status yang sederajat ini dibutuhkan untuk kesatuan dalam keluarga. Perempuan adalah "penolong" bagi

suaminya sedangkan laki-laki adalah "penyesuai" bagi istrinya. Keduanya saling tolong-menolong sesuai dengan kodrat, karunia, kekhasan, dan situasi yang mereka miliki ("inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku", ayat 23). Dalam hal ini tidak dikenal pembagian tugas yang kaku, misalnya istri tidak boleh membantu mencari nafkah atau suami tidak boleh ambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga (Sinulingga, 2006).

## **2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.**

Makna dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yakni setiap manusia harus diperlakukan secara sama tanpa membedakan derajatnya, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. Implikasi dari sila tersebut maka setiap orang harus senantiasa memiliki sikap saling menghargai, saling mencintai, sikap tengang rasa, dan sikap tidak semena-mena pada orang lain. sehingga bentuk-bentuk tindakan tidak manusiawi seperti eksploitasi sangat tidak di perkenankan. Timbulnya nilai ini karena adanya pemikiran bahwasanya antara manusia satu dan manusia lainnya memiliki derajat yang sama, dan setara sebagai makhluk Tuhan YME.

Dalam kaitannya dengan gender maka implikasi dari sila ini yakni baik laki-laki atau perempuan tidak dibeda-bedakan, termasuk dalam hal bekerja dan mengurus rumah tangga. Hal ini tercermin dari peraturan-peraturan pemerintah yang memberikan porsi tersendiri bagi wanita untuk duduk dalam suatu pekerjaan/jabatan tertentu. Misalnya dalam kursi legislatif, pemerintah memberikan porsi 30% dari keseluruhan untuk khusus di alokasikan bagi wanita. Meski belum seimbang setidaknya ini menjadi suatu penguatan bahwa keadilan di indonesia tidak lagi dibeda-bedakan menurut gender. Bahkan di negara-negara selain

Indonesia angka perempuan yang ikut berpartisipasi dalam parlemen cukup tinggi misalnya di Rwanda 63,8%, Prancis 26,9% Inggris 22,5% Swedia 45%, dan Norwegia 39,6%. (www.ipu.org 2013).

Ketika di kaji dari sisi perempuan kepala rumah tangga maka sebenarnya sila ini dapat menjadi suatu penguatan fenomena tersebut, karena pada dasarnya sila ini memandang setiap orang secara adil tanpa membeda-bedakan jenis kelaminnya. Namun adil pada kasus ini juga harus di pandang secara luas, karena terkait dengan kompetensi masing-masing individu. Apakah seorang laki-laki yang menggantikan peran istrinya untuk mengurus dan mempersiapkan kebutuhan rumah benar-benar bisa melakukannya dengan baik atau tidak, jika penukaran tugas antara laki-laki dan perempuan tersebut justru menimbulkan masalah baru karena ketidak mampuan salah satu pihak, maka hal tersebut tidak dapat di katakan adil.

### **3. Persatuan Indonesia**

Lahirnya sila ini atas dasar kesadaran bahwa secara geografis Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari pulau-pulau, hal itu mengakibatkan perbedaan-perbedaan budaya bahasa dan kebiasaan lainnya dan harus di satukan menjadi satu tanpa menghilangkan ciri-ciri masing-masing daerah. Dalam memupuk persatuan suatu negara sebenarnya perempuan juga dapat mengambil peran sentral, misalnya seperti kasus yang ada di Rwanda, adanya Genosida tahun 1994 yang terjadi antara suku Hutu dan Tutsi mengakibatkan 70 % dari populasi di Rwanda adalah perempuan. Keadaan ini mendesak perempuan mengambil peran utama dalam rekonstruksi pasca-konflik dan membangun perdamaian, meski hal tersebut sebelumnya merupakan hal yang di anggap tabu dalam sistem patriarkal (Kattou 2014). Di tengah

kerasnya konflik etnis, perempuan Rwanda melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Keterlibatan mereka dalam situasi yang penuh ancaman keamanan merupakan salah satu kontribusi mereka dalam proses perdamaian. Mereka juga melakukan rekonstruksi pasca-genosida, membangun solidaritas dan menciptakan persatuan.

Dari contoh kasus tersebut kita dapat pahami bahwa perempuan dapat mendobrak tradisi dan anggapan bahwa perempuan hanya cocok untuk bekerja di rumah, bahkan perempuan dapat melakukan mediasi guna membangun persatuan dan kesatuan. Sehingga alangkah baiknya kita mulai untuk meninggalkan stigma bahwa wanita hanya cocok bekerja di rumah, sebagai warganegara perempuan juga memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan peraturan dan kesatuan Indonesia. Sehingga fenomena masyarakat Indonesia yang menganggap aneh ketika ada Perempuan menjadi kepala rumah tangga dapat di hilangkan. Kita harus belajar banyak dari kasus yang terjadi di Rwanda untuk selalu membebaskan perempuan untuk melakukan berbagai macam peran, yang setara dengan laki-laki.

#### **4. Kerakyatan yang di pimpin hikmat dalam kebijaksanaan**

Dalam sila ke empat Pancasila ini mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana demokrasi yang kita anut menggunakan asas perwakilan. Dalam hal perempuan Indonesia telah memiliki aturan yang memberikan kursi legislatif sebanyak 30% kepada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan telah di percaya untuk turut serta memimpin negeri, namun di sayangkan dari atah 30% yang ada keterwakilan perempuan di badan legislatif masih lah sangat rendah. Di negara lain peran perempuan dalam sistem demokrasi

semakin terlihat Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa terdapat 63,8% perempuan Rwanda di parlemen. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara Barat seperti Prancis (26,9%), Inggris (22,5%), AS (17,8%); dan negara-negara Scandinavia seperti Swedia (45%); Finlandia (42,5%); Norwegia (39,6%) (www.ipu.org 2013). Prestasi lain beberapa perempuan Afrika adalah Ellen Johnson-Sirleaf menjadi Presiden Liberia pada tahun 2005. Dr Wangari Maathai dari Kenya dinobatkan menjadi perempuan Afrika pertama yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2004.

Meski demikian hal ini membuktikan bahwa perempuan telah memiliki status kewarganegaraan dan dapat mengambil peran tersebut secara penuh, meski secara lahiriah mereka memiliki tanggung jawab yang memang tidak bisa secara murni mereka tinggalkan untuk digantikan perannya oleh laki-laki. Misalnya menyusui bayi mereka ataupun kasih sayang yang mereka berikan kepada keluarga. Yang perlu di garis bawahi yakni bahwa negara tidak membatasi hak wanita untuk ikut serta menjadi perwakilan rakyat / Legislatif, bahkan negara telah memfasilitasinya. Hanya saja hal tersebut dikembalikan kepada masing-masing individu untuk memilih apakah akan mengambil peran tersebut atau memilih untuk meneruskan peran-peran yang telah digariskan secara lahiriah bagi mereka.

## **5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.**

Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia mengisyaratkan bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib diperlakukan sama dan setara tanpa membedakan perempuan, Selain itu adanya sila ini juga menuntut masyarakat untuk dapat menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini di kembangkanlah

perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai keadilan sosial mengamatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Misalnya hak untuk mendapat pekerjaan dan pendidikan

Hak Pendidikan pada kaum perempuan mulai populer dikalangan Masyarakat Indonesia sejak era Kartini, kartini kala itu pemikiran-pemikiran Kartini di publikasikan dalam sebuah buku berjudul habis gelap terbitlah terang. Buku tersebut menceritakan perjuangan kartini sebagai wanita demi mendapatkan hak nya suntu dapat menempuh pendidikan. Belajar dari kartini era saat ini perempuan telah dapat mengisi ruang-ruang yang pada jaman dahulu hanya dapat di isi oleh laki-laki. Kini banyak perempuan yang berprofesi sebagai pegawai kantoran, reporter, sopir, tukang ojeg, politisi bahkan kuli bangunan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia telah memperjuangkan keadilan sosial bagi perempuan dalam hal pendidikan dan pekerjaan.

### **Kesimpulan**

Fenomena pertukaran peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, dimana perempuan bertugas mencari nafkah sementara laki-laki mengurus kebutuhan rumah tangga merupakan suatu bentuk baru dari emansipasi wanita. Fenomena ini berawal dari adanya paham feminisme yang pada mulanya berkembang di negara-negara eropa. Meski bergantian peran fenomena tersebut tidak serta merta membuat peralihan peran penuh laki-laki dan perempuan di dalam suatu rumah tangga, hal tersebut dikarenakan perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan lahiriah yang menuntut suatu peran tertentu. Contoh meski seorang perempuan

menjadi kepala rumah tangga yang bekerja untuk mencari nafkah maka laki-laki tetap tidak akan bisa menggantikan perannya untuk mengandung anak. Begitu pula keterbatasan perempuan dalam hal jasmani, dimana laki-laki cenderung memiliki kekuatan jasmani lebih kuat dibanding wanita sehingga peran-peran laki-laki yang membutuhkan kekuatan fisik tidak serta merta bisa di gantikan sepenuhnya oleh wanita.

Pancasila sebagai suatu ideologi yang juga bertugas untuk menjadi filterisasi dan jangkar transendental untuk memfilterasi budaya-budaya dan paham yang berasal dari luar, bertugas untuk mengali dan menilai apakah budaya wanita kepala rumah tangga ini layak dan cocok untuk masyarakat indonesia atau tidak. Dari hasil kajian nilai-nilai pancasila sila pertama hingga kelima, maka tidak ditemukan adanya pembatasan, larangan atau ketidakcocokkan nilai pancasila dengan fenomena tersebut. Justru pancasila dapat menjadi justifikasi atau pembenaran dari adanya fenomena tersebut. Sila-sila kelima misalnya, pada sila tersebut keadilan diungkapkan bahwa keadilan harus senan tiasa di tegakan, sehingga implikasinya wanita dapat memperoleh pekerjaan-pekerjaan serta pendidikan yang sama dengan apa yang di peroleh oleh kamu laki-laki.

Namun yang menjadi catatan adalah peran wanita sebagai kepala rumah tangga ini harus di pandang sebagai sesuatu yang dapat saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Bukan sebagai suatu sarana mengeksploitasi perempuan untuk bekerja sekeras mungkin sementara laki-laki sebagai seorang suami tinggal menikmati hasilnya. Tentu jika dalam konteks ini tidak terjadi keadilan, dan melanggar nilai-nilai pancasila, karena terjadi pemaksaan peran dan ketidak adilan dalam pembagian hak dan kewajiban dari seorang warganegara.

## Daftar Pustaka

- Marshall, T.H. 1950. *Citizenship and Social Class*. Dalam Manza, Jeff and Michael Sauder. 2009. *Inequality and Society*. New York, W.W. Norton and Co.
- Sinulingga, R. (2006). *Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Agama Kristen*. *Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Agama Kristen*.
- Jones, Katelyn. 2011. *West African Women Unite: the Inclusion of Women in Peace Process*. Diakses dari <http://129.100.242.151/xampp/ojs/index.php/UTJR/article/download/15/14>. Diakses pada 10/2/2014.
- Kattou, Elena. 2014. *Women and Peacebuilding in Rwanda*. The African Union Human Rights Memorial. Diakses dari <http://alembekagn.org/news-a-articles/articles/129-women-and-peacebuilding-in-rwanda>. Diakses pada 10/2/2014.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Ramadhan Prasetya Wibawa, S.Pd., M.Pd.**, lahir di Karanganyar, 26 April 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK PAP FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010). Dan S2 di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2013). Saat ini adalah Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Madiun.

Beberapa karya penelitian yang didanai oleh DRPM Ristek Dikti diantaranya; yaitu Implementasi Sistem Ekonomi Berbasis Komunitas Sebagai Metode Alternatif Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pada Masyarakat Madiun didanai Dikti Tahun 2017 dan Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Menjalankan Fungsi Keluarga dan Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga di Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Jawa Tengah didanai Dikti Tahun 2018. Saran, kritik dan diskusi sangat diharapkan guna peningkatan keilmuan, penulis dapat dihubungi melalui HP: 085647108848, dan email:ramadhan@unipma.ac.id



**Liana Vivin Wihartanti, S.Pd., M.Pd.**, lahir di Sragen, 19 Maret 1987. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK PAP FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010). Dan S2 di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2013). Saat ini adalah Dosen Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun.

Beberapa karya penelitian yang didanai oleh DRPM Ristek Dikti diantaranya; yaitu Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Menjalankan Fungsi Keluarga dan Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga di Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Jawa Tengah didanai Dikti Tahun 2018. Saran, kritik dan diskusi sangat diharapkan guna peningkatan

keilmuan, penulis dapat dihubungi melalui HP: 085647387727, dan email:lianavivin1987@gmail.com



**Khoirul Huda, S.Pd., M.Pd.**, lahir di Ponorogo, 15 September 1989. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Madiun (2012). Dan S2 di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2014). Saat ini adalah Dosen Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Madiun.

Beberapa karya penelitian yang didanai oleh DRPM Ristek Dikti diantaranya; yaitu Peran Perempuan Kapuk Dalam Perekonomian Suku Samin Tapelan Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal SMA di Kabupaten Bojonegoro dan IbM Pemberdayaan Para Penyandang Kusta di Kecamatan Geneng dan Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi yang didanai Dikti Tahun 2017. Saran, kritik dan diskusi sangat diharapkan guna peningkatan keilmuan, penulis dapat dihubungi melalui HP: 085789972087, dan email:khoirulhuda@unipma.ac.id.



**Yoga Ardian Feriandi, M.Pd.**, lahir di Ngawi, 18 Juli 1991. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Ngawi (2013). Dan S2 di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta (2014). Saat ini adalah Dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Madiun.

Beberapa karya penelitian yang didanai oleh Hibah LPPM UNIPMA diantaranya; yaitu Analisis Penguasaan *Civic Competence* mahasiswa PPKn Universitas PGRI Madiun yang didanai LPPM UNIPMA Tahun 2018 dan Pelatihan penyusunan Soal UASBN pada Mata Pelajaran PPKN di MGMP PPKN SMP Kota Madiun yang didanai Dikti Tahun 2017. Saran, kritik dan diskusi sangat diharapkan guna peningkatan keilmuan, penulis dapat dihubungi melalui HP: 085330333178, dan email:yogaardianferiandi@unipma.ac.id.